



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat : Jln. S. Parman No.7 Telp. (0286) 594442 Banjarnegara 53412 e-mail:
dispermadesppkb.bna@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kepala Dinas atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi. Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat serta kepada pihak lain yang membutuhkan.

LKjIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu, laporan kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrument dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini jauh dari sempurna, baik isi maupun materi yang disampaikan. Akan tetapi mudah-mudahan laporan ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Banjarnegara, 28 Januari 2021


KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA
HENDRO CAHYONO, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Gambaran Umum..... 1

 1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi 1

 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 1

 3. Struktur Organisasi 1

 4. Keadaan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 3

 B. Permasalahan dan Isu Strategis..... 4

 C. Sistematika LKjIP 6

BAB II. PERJANJIAN KINERJA..... 7

 A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 7

 1. Visi Bupati Banjarnegara 7

 2. Misi Bupati Banjarnegara 7

 B. Perjanjian Kinerja 8

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 10

 A. Capaian Kinerja Organisasi 10

 Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan desa 12

 Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa 20

 Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Masyarakat..... 24

 Sasaran 4. Meningkatnya Partisipasi Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat 28

 Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Serta Data Mikro Keluarga Secara Berjenjang, Diperbaharui dan Berkesinambungan 38

 Sasaran 6. Meningkatnya kesertaan KB 40

 Sasaran 7. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 58

 Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 60

 B. Realisasi Anggaran 68

BAB IV. PENUTUP..... 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020.....	3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	3
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2020.....	4
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2020.....	8
Tabel 2.2	Rincian Anggaran Per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020	9
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 202-	10
Tabel 3.2	Komponen Indek Desa Membangun.....	12
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2020	12
Tabel 3.4	Rekapitulasi Status Perkembangan Desa Berdasarkan IDM Tahun 2017-2020	13
Tabel 3.5	Rekapitulasi Desa Tertinggal Tahun 2020	15
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017-2019.....	15
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah	16
Tabel 3.8	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa.....	18
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2019	20
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2017-2020	21
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	22
Tabel 3.12	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD	23

Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2020.....	24
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Tahun 2015-2020.....	25
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	25
Tabel 3.16	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes.....	26
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020.....	28
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2020	29
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	30
Tabel 3.20	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	31
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan Tahun 2020	34
Tabel 3.22	Daftar TP PKK Desa Yang Dibina Tahun 2020	34
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan Tahun 2016-2020	34
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.25	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan	36
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2020	38
Tabel 3.27	Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2017-2020	39
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun dibandingkan dengan Target Jangka Menengah..	39
Tabel 3.29	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun.....	39
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020	41

Tabel 3.31	Capaian Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2016-2020	42
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	42
Tabel 3.33	Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Target Provinsi Jawa Tengah.....	42
Tabel 3.34	Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	43
Tabel 3.35	Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	43
Tabel 3.36	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Angka Kelahiran Total (TFR).....	44
Tabel 3.37	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020	46
Tabel 3.38	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020	47
Tabel 3.39	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	48
Tabel 3.40	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara..	48
Tabel 3.41	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Nasional	49
Tabel 3.42	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peserta KB Aktif	50
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Tahun 2020	51
Tabel 3.44	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Tahun 2016-2020.....	51
Tabel 3.45	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	52
Tabel 3.46	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara.....	52
Tabel 3.47	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Dibandingkan dengan Target Nasional	53
Tabel 3.48	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>).....	54
Tabel 3.49	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2020.....	54
Tabel 3.50	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2016-2020.....	55

Tabel 3.51	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Membandingkan dengan Target Jangka Menengah	56
Tabel 3.52	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun).....	56
Tabel 3.53	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	58
Tabel 3.54	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020	58
Tabel 3.55	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	59
Tabel 3.56	Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat.....	59
Tabel 3.57	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	60
Tabel 3.58	Realisasi Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020	62
Tabel 3.59	Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016-2020	63
Tabel 3.60	Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	63
Tabel 3.61	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65
Tabel 3.62	Nilai Sistem AKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara Tahun 2018 – 2020	64
Tabel 3.63	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66
Tabel 3.64	Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara	15
Gambar 3.1	Capaian Persentase Tingkat Perkembangan Desa	16
Gambar 3.2	Jumlah Desa Berkembang di Kab. Banjarnegara Tahun 2017-2020	16
Gambar 3.3	Jumlah Desa Berdasarkan Strata IDM di Kab.Banjarnegara Tahun 2020	17
Gambar 3.4	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2020	22
Gambar 3.5	Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2018 – 2020	25
Gambar 3.6	Angka Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2016 – 2020	42
Gambar 3.7	Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016 – 2020	47
Gambar 3.8	Persentase Peserta KB Aktif di Jawa Tengah dan Kab/kota sekitar	48
Gambar 3.9	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	52
Gambar 3.10	Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016 – 2020	55
Gambar 3.11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dispermades PPKB	58
Gambar 3.12	Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara	63
Gambar 3.13	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 – 2020	71

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

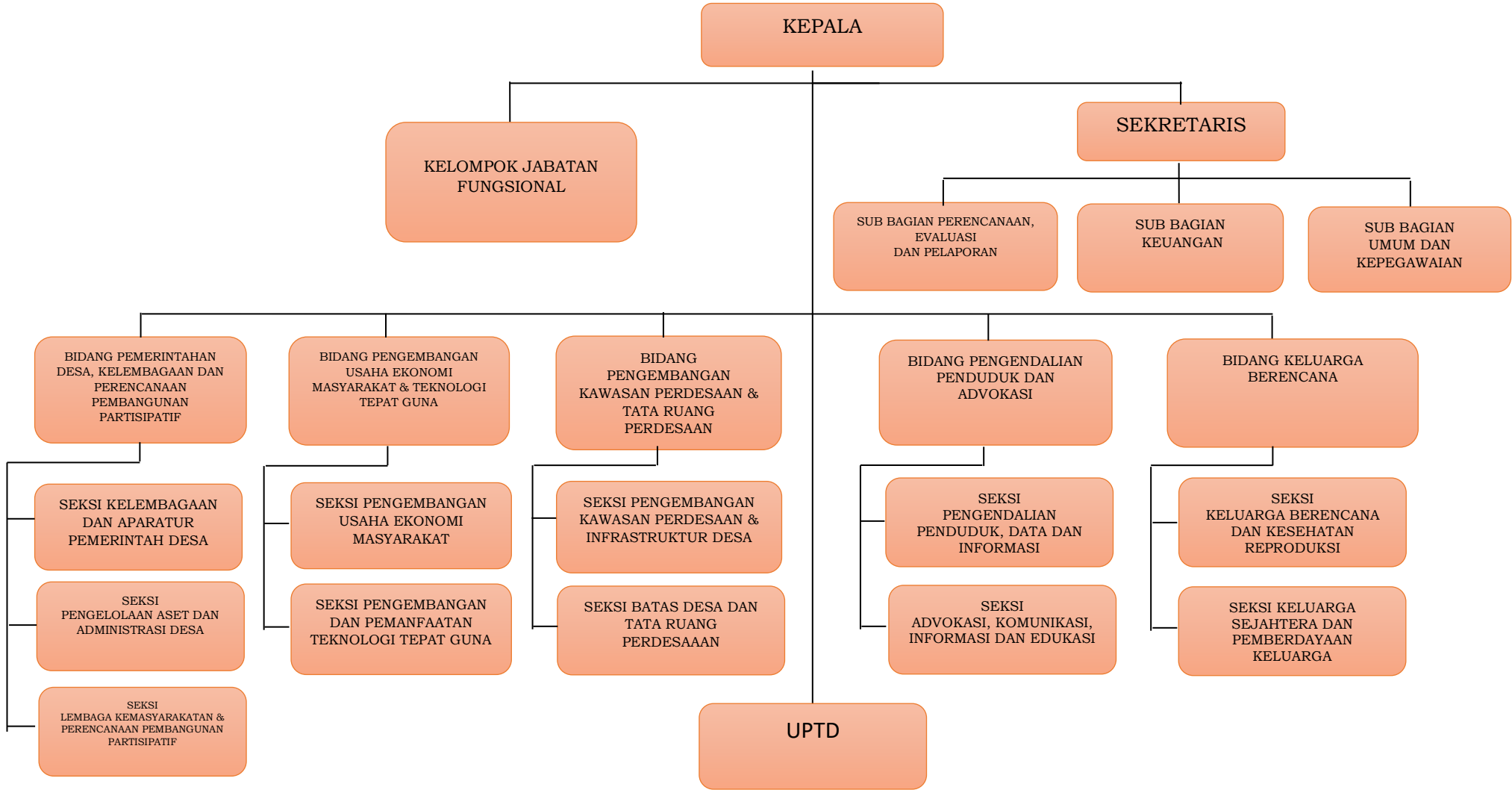
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Dispermades PPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



4. Keadaan Internal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana

- a) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut status kepegawaian
- Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	PNS	24	18	42
2.	PTT	-	-	-
3.	THL	11	17	28
Jumlah		35	35	70

Sumber : Dispermades PPKB, 2020

Komposisi pegawai yang ada pada DISPERMADES PPKB tahun 2020 berdasarkan status kepegawaian berjumlah 70 orang terdiri PNS 42 orang dan THL 28 orang.

- b) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut tingkat pendidikan
- Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada pada Dispermades PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	4	0	0	0	4
3	SMA Sederajat	8	3	10	8	29
4	D3	1	2	1	3	7
5	S1	10	9	6	0	25
6	S2	1	4	0	0	5
Jumlah		24	18	17	11	70

Sumber : Dispermades PPKB, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2, omposisi pegawai yang ada di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pendidikan S1 dan SMA. Pendidikan terendah pegawai yaitu SMP sederajat.

- c) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut pangkat dan golongan ruang

Komposisi pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2020 pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Pangkat	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	4	5	9
4	Penata Tk. I	III/d	5	2	7
5	Penata	III/c	1	3	4
6	Penata Muda Tk.I	III/b	-	3	3
7	Penata Muda	III/a	4	4	8
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	1	2
9	Pengatur	II/c	4	-	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda	II/a	3	-	3
12	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
13	Juru	I/c	-	-	-
14	PTT	-	0	0	0
15	THL	-	11	17	28
Jumlah			35	35	70

Sumber : Dispermades PPKB, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3, pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB, jumlah terbanyak pada golongan III kemudian disusul golongan IV dan jumlah paling sedikit pada golongan II.

B. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal;

2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang ditandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan informasi desa;
3. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
4. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
 - c. Kurangnya optimalnya manajemen pengelolaan BUMDes;
 - d. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat/BUMDes;
 - e. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
5. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
6. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
7. Masih tinggi Total Fertility Rate (TFR);
8. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;

9. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
10. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
11. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
12. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penyusunan laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKJIP

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kepala Daerah
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada visi, misi dan tujuan Kepala Daerah yang tercantum pada dokumen RPJMD.

1. VISI

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

2. MISI

Misi-misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah :

1. Misi Ke 2 (dua), : **“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan berdasarkan konsep tata kelola yang baik”**, dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa didukung strategi kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;

2. Misi Ke 5 (lima), : **“Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar”**, dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas dan sasaran Meningkatkan kualitas dan di dukung Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yan merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepada Bupati Banjarnegara. Perjanjian KInerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan 8 (enam) sasaran strategis dengan 12 (duabelas) indikator. Indikator kinerja mengacu dan pada tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	1.1	Persentase tingkat perkembangan desa	7%
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa	2.1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	80%
3.	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	3.1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	60%
4.	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	4.1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	26%
		4.2	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di pedesaan	26%
5.	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	5.1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan tiap tahun	100%
6.	Meningkatnya kesertaan KB	6.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,30
		6.2	Persentase Peserta KB Aktif	78,24%
		6.3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet Need)	7,01%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		6.4 Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun)	2,97%
7.	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77
8.	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp12.777.539.747,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp5.969.789.747,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.807.750.000,00. Rincian anggaran per program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rincian Anggaran Per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	897.372.691,00
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	362.750.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	214.325.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	43.725.000,00
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan	30.000.000,00
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	95.120.000,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	125.000.000,00
9	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	155.205.000,00
10	Program Keluarga Berencana	6.858.553.500,00
11	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	4.843.250,00
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	50.124.650,00
13	Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	9.518.000,00
14	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.075.700,00
15	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	199.984.200,00
16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3.625.978.752,00
17	Program Pengembangan Data/Informasi	20.000.000,00
18	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	68.874.000,00
Jumlah		12.777.539.747,00

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun anggaran 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, pada Bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk capaian kinerja tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2020, Dispermades PPKB telah menetapkan 8 (delapan) sasaran. Ke 8 (delapan) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta upaya apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan target pada tahun yang akan datang.

Realisasi sampai akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 12 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat baik (111, 92%) dan efisien dalam penyerapan anggaran (90,66%). Realisasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2020 disajikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian singkat realisasi kinerja masing-masing indikator sasaran Dispermades PPKB Tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
			URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	1.1	Persentase tingkat perkembangan desa	7%	3,98%	56,86%
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	2.1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	80%	86,19%	107,74%
3	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	3.1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	60%	82,20%	137%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
			URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	4.1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	26%	27,81%	106,96%
		4.2	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	26%	30,87%	118,74%
5	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	5.1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kesertaan KB	6.2	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	2,108	109,108%
		6.3	Persentase peserta KB aktif	78,24%	80,24%	102,56%
		6.4.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	7,01%	6,91%	101,45%
		6.5	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,97%	1,724%	161,83%
7	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	7.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77	90,38	117,38%
8	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	8.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	BB	123,42%
Rata-rata capaian						111,92%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tingkat perkembangan desa. Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat perkembangan desa. Penentuan strata desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun.. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang terbentuk berdasarkan indeks sebagai berikut :

Tabel 3.2. Komponen Indek Desa Membangun

No	Komponen	Dimensi
1	Ketahanan Sosial	Modal Sosial : Solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial
		Kesehatan : Pelayanan kesehatan, keberadaan asyarakat untuk kesehatan.
		Pendidikan : Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses ke Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengetahuan.
		Permukiman : Akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses ke informasi dan komunikasi
2	Ketahanan Ekonomi	Keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah
3	Ketahanan Ekologi	Keterbukaan wilayah, Potensi rawan bencana dan tanggap bencana,

Sumber : Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Jumlah desa berdasarkan strata berdasarkan hasil *update* Data Indeks Desa Membangun Tahun 2020 dan sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Adapun realisasi tingkat perkembangan desa tahun 2020 di Kabupaten Bajarnegaradapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan desa	7% (223 desa)	3,98% (201 desa)	56,86%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah , 2020

Capaian kinerja persentase tingkat perkembangan desa diperoleh penghitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah desa berkembang tahun } n - \text{Jumlah Desa Berkembang tahun } n - 1}{\text{Jumlah desa berkembang tahun } n - 1} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{\text{Jumlah desa berkembang tahun 2020} - \text{Jumlah Desa Berkembang tahun 2019}}{\text{Jumlah desa berkembang tahun 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{209 - 201}{201} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{201} \times 100\%$$

$$= 3,98\%$$

Berdasarkan data di atas, realisasi capaian kinerja sebesar 3,98% belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 7%. Artinya total peningkatan jumlah desa berkembang masih belum memenuhi persentase target yang ditetapkan. Rekapitulasi jumlah desa berdasarkan strata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rekapitulasi Status Perkembangan Desa Berdasarkan IDM Tahun 2017-2020

Tahun	Indeks Desa Membangun					Jumlah
	Sangat tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
2017	2	77	161	25	1	266
2018	2	64	176	22	2	266
2019	0	35	201	28	2	266
2020	0	22	209	33	2	266

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah total desa berkembang saat ini sebanyak 209 desa, meningkat sebanyak 8 desa dari target peningkatan minimal 14 desa. Namun demikian berdasarkan rincian data 35 desa tertinggal pada tahun 2019, terdapat 18 desa yang meningkat stratanya menjadi desa berkembang dan 17 sisanya masih berstatus desa tertinggal.

Dari penambahan 18 desa tersebut, seharusnya jumlah desa berkembang menjadi 219 pada tahun 2020. Namun pada rincian desa berkembang pada tahun 2019 terdapat 10 desa yang berubah stratanya (5 desa naik menjadi desa maju dan 5 desa turun menjadi desa tertinggal). Dengan demikian jumlah desa berkembang pada tahun 2020 berkurang sebanyak 10 desa. Kelima desa yang menurun statusnya dari desa berkembang menjadi tertinggal sebagai berikut :

1. Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok
Berdasarkan nilai penyusun IDM, Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok mengalami penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekonomi. Hal tersebut karena angka kemiskinan meningkat dan mayoritas mata pencaharian penduduk yaitu sebagai besar buruh dan pekerja harian lepas.
2. Desa Purwodadi Kecamatan Karangobar
Berdasarkan nilai penyusun IDM, Desa Purwodadi mengalami penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Ekonomi dikarenakan banyak terdapat kedai makanan dan minuman yang tutup karena pandemi Covid-2019.. Selain itu dari segi lingkungan, unit pengelolaan sampah yang berhenti beroperasi. Hal ini berpengaruh pada akses sanitasi masyarakat dimana pengelolaan sampah tidak terpakai lagi. Pada dimensi ekonomi banyak terdapat kedai makanan dan minuman yang tutup karena pandemi Covid-2019.
3. Desa Karangsari Kecamatan Pejawaran
Berdasarkan nilai penyusun IDM, Desa Karangsari mengalami penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Lingkungan karena Strata turun karena penilaian di bidang kesehatan kurang memenuhi yaitu pada ketersediaan jamban serta nilai stunting yang lebih tinggi.
4. Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening
Berdasarkan nilai penyusun IDM, Desa Kalibombong mengalami penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Ekonomi. Penurunan nilai tersebut terkait dengan terjadinya bencana yang berdampak pada terganggunya aktifitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.
5. Desa Kertosari Kecamatan Kalibening
Berdasarkan nilai penyusun IDM, Desa Kertosari mengalami penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Penurunan nilai tersebut terutama dikarenakan akibat terjadinya gempa bumi di wilayah Kecamatan Kalibening termasuk di Desa Kertosari pada tahun 2018 dimana sebagian besar rumah warga dan bangunan gedung rusak berat sehingga tidak bisa dihuni lagi. Bencana tersebut berakibat pada terganggunya aktifitas ekonomi dan pendapatan masyarakat yang menurun sehingga nilai Komposit Ekonomi menurun.

Disisi lain, pembangunan desa pada tahun 2020 secara keseluruhan dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 termasuk prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana pemanfaatan Dana Desa juga diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini berdampak pada perubahan rencana kegiatan yang sudah dialokasikan pada APBDes, untuk dialihkan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan data Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara sebanyak lebih dari 50 persen Dana Desa

dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan covid-19 (Bidang Tak Terduga) dan sebesar 39 persen untuk Bidang Pembangunan. Selain berpengaruh pada dana pembangunan, pandemic covid-19 juga berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan berdampak pada menurunnya pendapaat ekonomi masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada peningkatan strata desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Rekapitulasi desa yang masih berstatus desa tertinggal Tahun 2020 tercantum pada tabel sebagai berikut .

Tabel 3.5. Rekapitulasi Desa Tertinggal Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
1.	Purwareja Klampok	Sirkandi
2.	Sigaluh	Sawal
3.	Karangkobar	Paweden, Gumelar, Purwodadi, Slatri, Pasuruhan, Karngggondang, Ambal, Binangun
4.	Pagentan	Gumingsir, Metawana
5.	Pejawaran	Karangsari, Giritirta
6.	Kalibening	Kalibombong, Kertosari, Kasinoman
7.	Pandamarum	Pandamarum, Sinduaji, Pasegeran, Sirongge
8.	Pagedongan	Duren

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Pada tabel di atas, desa tertinggal terbanyak pada Kecamatan Karangkobar (8 desa), Kecamatan Pandamarum (4 desa) dan Kecamatan Kalibening (3 desa). Ketiga daerah tersebut berada di wilayah pegunungan dan pada beberapa wilayah memiliki akses yang terbatas sehingga relative lebih sulit untuk dilaksanakan pengembangan wilayah di banding daerah lainnya di Kabupaten Banjarnegara. Demikian juga dengan Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Pejawaran terletak pada daerah pegunungan dan khususnya Kecamatan Pagentan sering terdampak bendana tanah longsor yang berakibat pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

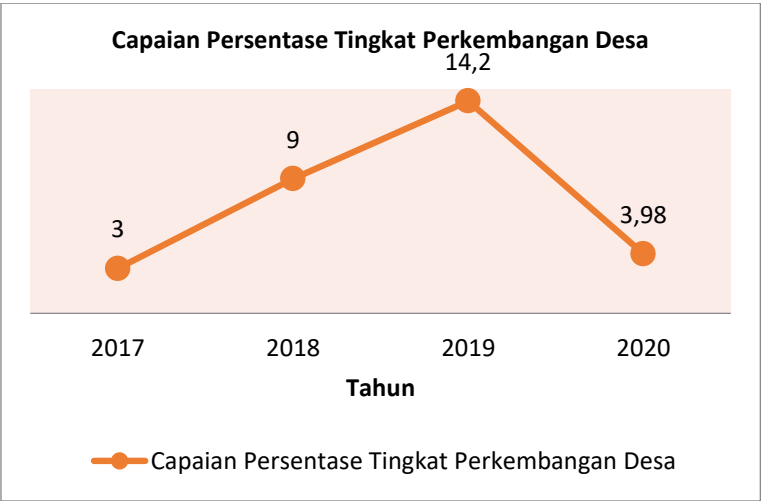
Realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan desa tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	5
1	Persentase tingkat perkembangan desa	3% (161 desa)	9% (176 desa)	14,20% (201 desa)	3,98% (209 desa)

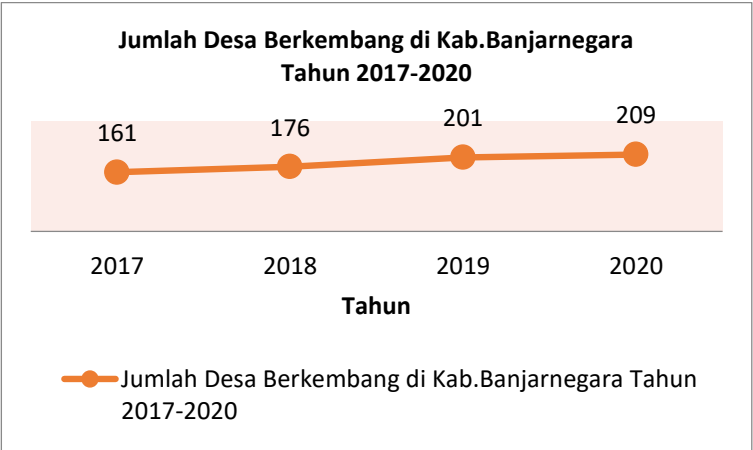
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Capaian persentase tingkat perkembangan desa tahun 2017 sampai dengan 2020 digambarkan dalam gambar 3.1



Gambar 3.1. Capaian Persentase Tingkat Perkembangan Desa

Berdasarkan Tabel 3.6, persentase tingkat perkembangan desa tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya walaupun jumlah desa berkembang terus meningkat. Peningkatan jumlah desa berkembang tahun 2017 sampai dengan 2020 disajikan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Jumlah Desa Berkembang di Kab. Banjarnegara Tahun 2017-2020

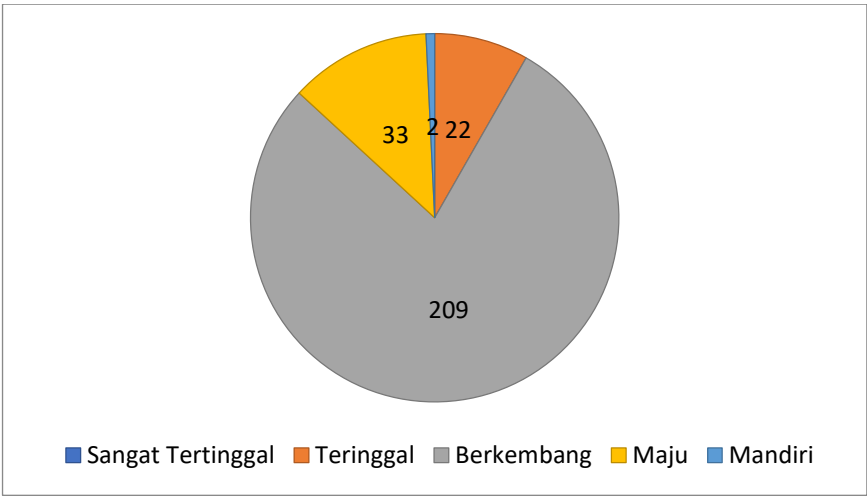
Capaian kinerja persentase tingkat perkembangan desa dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2019	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan desa	11%	3,98%	36%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.7, realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan desa masih belum mencapai target akhir Renstra tahun 2020. Rekapitulasi jumlah desa berdasarkan strata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2020 digambarkan pada gambar 3.3.



Gambar 3.3. Jumlah Desa Berdasarkan Strata IDM di Kab.Banjarnegara Tahun 2020

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

- 1. Terjadinya bencana alam yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh pada menurunnya nilai ketahanan lingkungan (IKL) dan nilai ketahanan ekonomi (IKE);
- 2. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kurang optimalnya pendampingan dan monitoring terhadap indikator sasaran yang berpengaruh pada perkembangan desa;
- 3. Terjadinya bpandemi covid-19 yang berdampak pada perubahan pelaksanaan pengangunan desa untuk dialihkan ke penanganan dan pencegahan covid-19;
- 4. Meningkatnya kasus stunting pada beberapa wilayah yang berpengaruh pada indeks ketahanan sosial;
- 5. Terdapat yang ketersediaan akses jamban kurang sehingga berpengaruh pada indeks ketahanan sosial;

Solusi terhadap permasalahan :

- 1. Meningkatkan edukasi, mitigasi dan kewaspadaan terhadap bencana alam dalam rangka meminimalisir dampak negatif pada masyarakat maupun perkembangan desa;
- 2. Mengupayakan terobosan dan inovasi selama pandemi covid-19 agar pembinaan, pendampingan terhadap perkembangan desa bisa dilaksanakan secara maksimal;
- 3. Melaksanakan pendampingan terhadap daerah yang terdapat stunting maupun akses jamban sehat sesuai dengan kewenangan Disprmadases PPKB;
- 4. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pendampingan perkembangan desa;

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan desa digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	30.000.000	17	7%	29.939.950	17	3,98%	99,80 %	20	56,86 %
	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	30.000.000			12.723.750			99,99 %		
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.725.000			12.723.750			98,34		
	Kegiatan Pendampingan bantuan keuangan provinsi kepada desa	12.725.000			19.667.450			98,34		
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	95.120.000			92.553.765			97,30		
	Kegiatan Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa	94.000.000			92.433.765			97,27		
	Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan	1.120.000			1.120.000			100		
4	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	199.984.200			197.741.200			98,88		
	Kegiatan Revitalisasi Posyandu	199.984.200			197.741.200			98,88		
		337.829.200	17	7%	332.958.665	17	5,20%	3,98%	20	56,86 %

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja sebesar 284% dengan penyerapan keuangan sebesar 98,87%. Terdapat efisiensi sebesar 1,13% dari belanja transportasi dan akomodasi, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 12 orang PNS terdiri dari Golongan IV (4 orang), Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 3 orang, SLTA : 1 orang), Golongan II (3 orang) dan 5 orang THL. Ketujuh belas pelaksana tersebut merupakan potensi sumber daya manusia dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dengan sumber daya yang tersedia meskipun capaian belum memenuhi target.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase tingkat perkembangan desa tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, dengan output jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUMDes sebanyak 47 BUMDes. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya kordinasi, persiapan kegiatan, monitoring dan pendampingan pembentukan 46 BUMDes dan 1 BUMDes Bersama;
- Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes pada tanggal 15 Juni di Aula PIKAS Sigaluh bagi 29 BUMDes (20 BUMDes dasar dan 9 BUMDes tumbuh);
- Terlaksananya pendampingan 38 BUMDesa penyedia Sembako Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan COVID-19;
- Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes pada tanggal 18-19 Agustus 2020 di Wisata Kalionggok Desa Adipasir Kec. Rakit bagi 18 BUMDes (BumDes dasar);
- Terlaksananya evaluasi dan monitoring perkembangan BUMDes.

Kegiatan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa mendukung dimensi ekonomi desa penilaian strata desa yaitu diantaranya (1) sebagai salah satu wadah terciptanya keberagaman produksi masyarakat desa, (2) tersedianya akses pusat pelayanan perdagangan bagi bidang BUMDes perdagangan serta (3) tersedianya akses Lembaga keuangan/perkreditan bagi BUMDes yang melaksanakan simpan pinjam.

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,

Kegiatan Pendampingan bantuan keuangan provinsi kepada desa, dengan output sebagai berikut :

- Terlaksananya kordinasi dan sosialisasi bankeu ketahanan masyarakat;
- Terlaksananya fasilitasi usulan pencairan bankeu ketahanan masyarakat untuk 140 desa dari 140 desa penerima;
- Terfasilitasinya penyusunan LPJ bankeu Ketahanan Masyarakat untuk 140 desa penerima.

Berdasarkan pemanfaatan bantuan keuangan provinsi kepada desa pada tahun 2020 yaitu sebagai penyertaan modal BUMDes sebanyak Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) pada 140 desa pada zona merah dan zona kuning maka berpengaruh pada peningkatan dimensi ekonomi yaitu sebagai salah satu wadah terciptanya keberagaman produksi masyarakat desa.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Kegiatan Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa. Kegiatan ini mendukung dimensi sosial melalui solidaritas sosial yaitu kebiasaan gotong-royong di desa. Kegiatan ini memiliki output jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD sebanyak Rp738.997.000,00. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya TMMD Sengkuyung I di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan pada tanggal 15 Maret s.d 14 April 2020;
- 2) Terlaksananya TMMD Sengkuyung II di Desa Metawana Kecamatan Pagentan pada tanggal 30 Juni s.d 30 Juli 2020;

- 3) Terlaksananya TMMD Sengkuyung III di Desa Dawuhan Kecamatan Madukara pada tanggal 22 September s.d 21 Oktober 2020.
- Kegiatan Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa mendukung dimensi sosial yaitu solidaritas sosial dalam masyarakat desa.
- b. Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini mendukung dimensi ekonomi melalui ketersediaan lembaga keuangan dan perkreditan. Kegiatan ini memiliki output yaitu jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya sebanyak 20 UPK. Rincian kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksananya koordinasi dan monitoring pengelolaan keuangan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) UPK s.d Juni 2020;
 - Terlaksananya rekapitulasi data pengelolaan keuangan UPK sampai dengan Triwulan IV 2020.

Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan mendukung dimensi ekonomi yaitu tersedianya akses Lembaga keuangan/perkreditan bagi BUMDes yang melaksanakan simpan pinjam.

4. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- Kegiatan Revitalisasi Posyandu. Kegiatan ini mendukung dimensi kesehatan pada keberdayaan masyarakat untuk kesehatan melalui posyandu. Output kegiatan yaitu jumlah posyandu pratama dan madya yang dievaluasi sebanyak 412. Rincian kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksananya rakor pokjanal posyandu;
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kader Posyandu di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan posyandu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Lembaga Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD. Adapun pencapaian target sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	80%	86,19%	107,74%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Realisasi persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah Perangkat Desa baru yang dilatih :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Perangkat desa baru yang dilatih}}{\sum \text{Perangkat desa baru hasil proses pengisian}} \times 100\% \\ &= \frac{722}{550} \times 100\% \\ &= 131,27\% \end{aligned}$$

2. Jumlah Kepala Desa Baru yang dilatih

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Kepala desa baru yang dilatih}}{\sum \text{Kepala desa baru hasil pemilihan}} \times 100\% \\ &= \frac{64 + 195}{266} \times 100\% \\ &= \frac{259}{266} \times 100\% \\ &= 97,37\% \end{aligned}$$

3. Jumlah anggota BPD yang dilatih dan difasilitasi :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{anggota BPD yang sudah dilatih dan difasilitasi}}{\sum \text{anggota BPD}} \times 100\% \\ &= \frac{266 + 105 + 198}{1.901} \times 100\% \\ &= \frac{569}{1.901} \times 100\% \\ &= 29,93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh rata-rata sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{131,27\% + 97,37\% + 29,93\%}{3} \\ &= \frac{258,571\%}{3} \\ &= 86,19\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja sudah memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 lebih banyak dilaksanakan pelatihan/pendampingan kepada aparat baik berkaitan dengan urusan administrasi desa secara umum maupun pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid 19. Selama PandeMi covid-19, proses pendampingan dilaksanakan di masing-masing kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari Pemerintah Daerah.

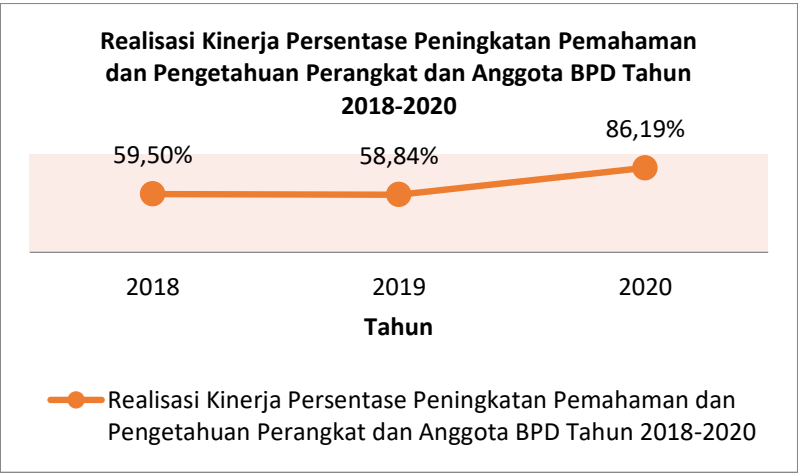
Realisasi kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	-	59,5%	59,84%	86,19%

Data DispermadesPPKB Diolah , 2020

Pada Tabel 3.10, capain 2020 mengalami peningkatan karena peningkatan kapasitas bagi kepala desa baru 195 kepala desa baru hasil pemilihan kepala desa pada tahun 2019. Jumlah kepala desa baru yang dilatih tersebut merupakan jumlah terbesar selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Selain itu, Dispermades PPKB lebih intensif dalam pendampingan aparat pemerintah desa dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut.



Gambar 3.4. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2020

Realisasi kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	86,19%	95,76%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Tabel 3.11, realisasi persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD pada tahun 2020 masih belum memenuhi target Renstra tahun 2022. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD harus lebih ditingkatkan kinerjanya.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Berbagai terobosan dan inovasi teknis yang dilaksanakan khususnya yang dilaksanakan selama pandemic covid-19 dalam rangka fasilitas dan pendampingan perangkat desa dan anggota BPD;

2. Adanya pendampingan dan koordinasi yang berkelanjutan baik oleh aparat pemerintah kabupaten maupun dibantu oleh Tim Tenaga Ahli bagi Desa sebanyak 6 orang,, Pendamping Desa (PD) sebanyak 48 orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebanyak 63 orang sehingga menjangkau seluruh wilayah desa di Kabupaten Banjarnegara.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Terus mengupayakan berbagai terobosan teknis lapangan dalam pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat desa dan anggota BPD;
2. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dalam pendampingan dan fasilitasi kepada pernakgtat desa dan anggota BPD.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa	214.325.000	3	80%	208.719.148	3	73,40%	97,38%	100	91,75%
		214.325.000	3	80%	208.719.148	3	73,40%	97,38%	100	91,75%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya belum mencapai sasaran kinerja. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang hanya sebesar 91,75%, dengan penyerapan keuangan sebesar 97,75%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,25% yang berasal dari belanja perjalanan dinas.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 3 orang PNS terdiri dari Golongan IV (1 orang), Golongan III (S1 : 2 orang). Ketiga pelaksana tersebut merupakan potensi sumber daya manusia dan telah melaksanakan tugas secara optimal dengan sumber daya yang tersedia meskipun capaian belum memenuhi target.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, capaian kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD didukung 1 (satu) program dengan 1 (kegiatan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output Kegiatan Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa yaitu (1) jumlah anggota BPD yang dilatih sebanyak 60 orang kurang, (2) Jumlah perangkat desa baru yang dilatih sebanyak 266, dan (3) Jumlah Kepala Desa baru yang dilatih sebanyak 195 orang. Rincian Kegiatan Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Bintel untuk 195 Kepala Desa Baru tanggal 2-5 Maret 2020;
- b. Terlaksananya bintel pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di 20 kecamatan bagi 266 perangkat desa pada tanggal 27 April - 13 Mei 2020;
- c. Terlaksananya pembinaan penyelarasan dan sinkronisasi penyusunan APBDes di 15 kecamatan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tingkat perkembangan BUMDes. Indikator ini untuk mengetahui jumlah desa yang memiliki BUMDes yang aktif dan berkembang. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	60%	82,199%	137%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Persentase tingkat perkembangan BUMDes diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{BUMDes yang berkembang dan aktif}}{\sum \text{BUMDes yang sudah ditetapkan dengan perdes}} \times 100\% \\ &= \frac{157}{266} \times 100\% \\ &= 82,199\% \\ &= 82,20\% \end{aligned}$$

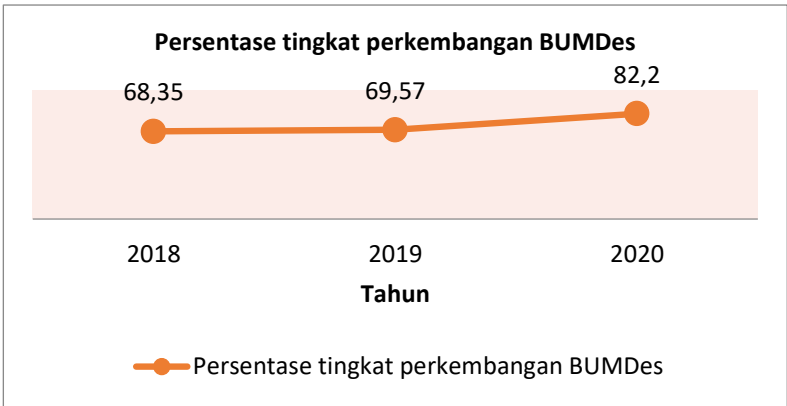
Berdasarkan data di atas, realisasi capaian persentase perkembangan BUMDes melebihi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2020, jumlah BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 191 dengan jumlah BUMDesa berkembang dan aktif sebanyak 157 BUMDes. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah BUMDesa berkembang dan aktif sebanyak 96 dari total 138 BUMDes. Penambahan jumlah BUMDes yang berkembang dan aktif sebanyak 61 unit. Penambahan jumlah BUMDes yang berkembang dan aktif tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan penyertaan modal

BUMDesa. Penyertaan modal BUMDes tersebut guna penyediaan sembako murah bagi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19. Selain itu, sebanyak 39 BUMDes terpilih sebagai suplyer sembako. Sehingga meskipun tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, masih bisa terjadi peningkatan perkembangan BUMDes. Realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan BUMDes dibandingkan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	-	-	68,35%	69,57%	82,20%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020



Gambar 3.5. Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2018 - 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase tingkat perkembangan BUMDesa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu mengelola potensi sumber daya ekonomi secara optimal. Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70 %	82,20%	117,43%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Realisasi persentase perkembangan BUMDes tahun 2020 dibandingkan target akhir Renstra tahun 2022 sudah mencapai target.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Dukungan, fasilitasi dan motivasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan dalam hal ini pengembangan BUMDes. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat memberikan bantuan senilai Rp20.000.000,00 dalam rangka penyertaan modal BUMDes bagi 140 desa penerima di zona merah dan kuning. Bantuan tersebut untuk penyediaan sembako yang dijual murah kepada masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu, Dispermades PPKB memberikan pendampinga kepada 38 BUMDes selaku supliyer sembako Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan COVID-19;
2. Komitmen dari aparat pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya sosial dan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pendampingan pembentukan BUMDes pada 46 desa;
3. Dukungan dari berbagai kalangan dalam upaya pendampingan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan yang mendukung perkembangan BUMDes;
4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi masyarakat.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Meningkatkan motivasi, pendidikan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan manajemen dan unit usaha BUMDes bagi aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes;
2. Mengoptimalkan pendampingan dan fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya ekonomi perdesaan dalam rangka pembentukan maupun pengembangan BUMDes;
3. Meningkatkan penjangingan, identifikasi dan aplikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) agar pengelolaan sumberdaya sosial dan ekonomi perdesaan optimal, efisien dan berhasil guna;
4. Memastikan komitmen pengambil kebijakan di desa terkait prioritas kemandirian ekonomi desa sebagai sarana menuju *welfare system*.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan BUMDes digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	30.000.000	9	60%	29.939.950	9	82,20%	99,80%	100%	137%
	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	30.000.000			29.939.950			99,80%		
2	Program Pengembangan Data / Informasi	20.000.000			19.966.150			99,83%		
	Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	20.000.000			19.966.150			99,83%		
		5.000.000	10	60%	71.932.875	10	82,20%	99,82%	100%	126,49%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 137% dengan penyerapan keuangan sebesar 99,82%. Terdapat efisiensi sebesar 0,18% yang berasal dari belanja bahan/perlengkapan alat peraga karya Teknologi Tepat Guna.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 7 orang PNS terdiri dari Golongan IV (S1: 2 orang), Golongan III (S1 : 1 orang), Golongan 2 (SLTA : 4 orang) dan 2 orang THL. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumber daya yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase tingkat perkembangan BUMDes yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Pengembangan Data/Informasi. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, dengan output jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUMDes sebanyak 47 BUMDes. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya kordinasi, persiapan kegiatan, monitoring dan pendampingan pembentukan 46 BUMDes dan 1 BUMDes Bersama;
- Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes pada tanggal 15 Juni di Aula PICAS Sigaluh bagi 29 BUMDes (20 BUMDes dasar dan 9 BUMDes tumbuh);

- Terlaksananya pendampingan 38 BUMDesa penyedia Sembako Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan COVID-19;
- Terlaksananya pelatihan manajemen BUMDes pada tanggal 18-19 Agustus 2020 di Wisata Kalionggok Desa Adipasir Kec. Rakit bagi 18 BUMDes (BumDes dasar);
- Terlaksananya evaluasi dan monitoring perkembangan BUMDes.

2. Program Pengembangan Data / Informasi

Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna memiliki output kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna pada bulan April 2020;
- Terpilihnya 3 karya yang memenuhi kriteria TTG : (1).Kompur Praktis Bahan Bakar Olahan Sampah oleh Budi Satrio Aji, (2).Pengolahan pakan Ternak oleh Saryo, SP dan (3).Alat Peraga Disaster AID oleh Asri Ratnasari;
- Terlaksananya pengadaan alat peraga sebanyak 3 paket dari pemenang lomba karya Teknologi Tepat Guna Tahun 2020.

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat

Sasaran meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.
 - b. Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan.
- Indikator ini untuk mengetahui peranan perempuan dalam pembangunan di perdesaan.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dipilih untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat desa terhadap program pemberdayaan masyarakat. Realisasi kinerja persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat tahun 2020 disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17. Realisasi Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Capaian
1	2				3	4	5
1	Persentase	swadaya	masyarakat	yang	26%	27,81%	106,96%
	mendukung program pemberdayaan masyarakat						

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Realisasi persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Persentase swadaya Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa

$$= \frac{\sum \text{swadaya masy yang mendukung program pemberdayaan masy desa}}{\sum \text{anggaran yang mendukung program pemberdayaan masyarakat desa}} \times 100\%$$
$$= \frac{76.135.000 + 194.390.000 + 468.472.000}{2.2657.625.000} \times 100\%$$
$$= \frac{738.997.000}{2.2657.625.000} \times 100\%$$
$$= 27,81\%$$

Berdasarkan data di atas, persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan kemandirian dan solidaritas sosial masyarakat dalam pembangunan di perdesaan semakin meningkat. Pada Tahun 2020, teknis pelaksanaan dalam pengumpulan swadaya masyarakat yaitu melalui Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di 3 tahap/lokasi (sengkuyung) yaitu Sengkuyung I (Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan), Sengkuyung II (Desa Metawana Kec. Pagentan) dan Sengkuyung III (Desa Dawuhan Kec. Madukara). Pada Sengkuyung I, jumlah swadaya yang dicapai relative lebih kecil dari Sengkuyung II dan III, hal ini dipengaruhi oleh jenis kegiatan di lapangan yang dilaksanakan. Sebagai informasi, pada Sengkuyung I pelaksanaan teknis berupa pembangunan jembatan. Pada jenis pekerjaan pembangunan jembatan, dalam pelaksanaannya membutuhkan teknologi dan keahlian khusus sehingga dalam proses pengerjaannya lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga dan sebagian kecil lainnya dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan pada Sengkuyung II dan III jenis kegiatan berupa pembangunan rabat beton, drainase dan talud dimana pada jenis pekerjaan tersebut masyarakat bisa berperan dan berpartisipasi lebih besar karena tidak memerlukan keahlian maupun teknologi yang tinggi. Jumlah swadaya pada Sengkuyung I sebesar Rp76.135.000,00, Sengkuyung II sebesar Rp194.390.000,00 dan Sengkuyung III sebesar Rp468.472.000,00. Capaian kinerja persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	25%	36%	40,75%	27,81%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan tabel 3.18, capaian tahun 2020 walaupun sudah memenuhi target capaian tetapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi kondisi

pandemic Covid-19 dimana terdapat pembatasan acara yang bersifat masal dan berkerumum dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 sehingga acara yang bersifat kegotong royongan masyarakat titunda atau bahkan ditiadakan. Pembatasan jumlah orang berkerumun sehingga masyarakat tidak bisa hadir secara keseluruhan dalam acara yang bersifat swadaya.

Kegiatan keswadayaan pada tahun 2020 hanya dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu TNI Manunggal Membangun Desa, sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya selain didukung oleh Kegiatan TMMD juga oleh kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan BBGRM merupakan kegiatan keswadayaan yang dilaksanakan secara serentak pada tiap kabupaten secara nasional. Namun karena adanya pandemi covid-19, sehingga BBGRM ditiadakan yang seyogyanya dilaksanakan pada Bulan April 2020. Capaian Kinerja Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30 %	27,81%	92,7%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa salah satu tujuan pengaturan desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi guna kesejahteraan bersama. Semakin besar partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat, desa memiliki modal sosial yang semakin tinggi. Modal sosial merupakan salah satu aspek penilaian dalam penentuan status perkembangan desa, semakin tinggi modal sosial maka memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan status perkembangan desa.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Kerjasama berbagai pihak dan berjenjang sampai dengan tingkat kelembagaan rumah tangga, kader dan tokoh masyarakat, terutama pada lokasi pelaksanaan kegiatan keswadayaan sehingga koordinasi dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggerakan masyarakat bisa diakses secara mudah dan *up to date*;
2. Komitmen yang besar dalam hal ini aparat TNI dalam pendampingan pembangunan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan keswadayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana;

3. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut merupakan sumbangsih dan pendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar;

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan koordinasi dan inovasi kegiatan teknis yang bersifat keswadayaan masyarakat;
2. Meningkatkan upaya-upaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai solidaritas sosial masyarakat sebagai salah satu modal sosial dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan lebih optimal dan berkesinambungan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan desa digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Dana (Rp)	SDM	Indika tor	Dana (Rp)	SDM	Indikat or	Dana	SDM	Indika tor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	43.725.000	15	26%	43.560.185	15	27,81%	99,62	100	106,96%
	a. Kegiatan Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat	31.000.000			30.836.435			99,47		
	b. Kegiatan Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa	12.725.000			12.723.750			99,99		
2.	Program Peningkatan Partisipasi Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat	95.120.000			92.553.765			97,30		
	Kegiatan Pendampingan TNI Manunggal Membangun Desa	94.000.000			92.433.765			97,27		
	Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan	1.120.000			1.120.000			100		
3	Program Peningkatan Perencanaan pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar	68.874.000			57.375.300			83,30		
	Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan	68.874.000			57.375.300			83,30		
		207.719.000	15	26%	193.489.250	15	40,5%	93,15	100	109,96 %

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah efisiensi dan optimal. Hasil yang optimal terlihat dari capaian kinerja yang

melebihi target dengan capaian sebesar 109,96% dan penyerapan keuangan sebesar 93,15%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,85% yang berasal dari belanja perjalanan dinas.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 10 orang PNS terdiri dari Golongan IV (S1 : 4 orang) Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 4 orang, SLTA : 1 orang), dan 5 orang THL. Keseluruhan pelaksana tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a. Kegiatan Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat, dengan output yaitu jumlah desa yang didampingi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat sebanyak 266 desa. Rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Terlaksananya pendampingan penyusunan RPJMDes (195 desa) yaitu desa yang pada tahun 2019 melaksanakan pilkades;
 - 2) Terlaksananya fasilitasi pencairan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk operasional KPMD bagi 266 desa;
 - 3) Terlaksananya pendampingan dan monitoring penyusunan APBDes perubahan dalam rangka rasionalisasi/penyesuaian Refokusing Anggaran APBDes Tahun 2020.
 - b. Kegiatan Pendampingan bantuan keuangan provinsi kepada desa, dengan output yaitu jumlah desa yang didampingi dan dimonitoring dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat) sebanyak 140 desa. Rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Terlaksananya kordinasi dan sosialisasi bantuan keuangan ketahanan masyarakat;
 - Terlaksananya fasilitasi usulan pencairan bantuan keuangan ketahanan masyarakat untuk 140 desa dari 140 desa penerima;
 - Terfasilitasinya penyusunan LPJ bantuan keuangan Ketahanan Masyarakat untuk 140 desa penerima.
2. Program Peningkatan Partisipasi Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat
 - a. Kegiatan Pendampingan TNI Manunggal Membangun Desa. Kegiatan ini memiliki output jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD sebanyak Rp738.997.000,00. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD sebanyak Rp738.997.000,00,00;
 - 2) Terlaksananya TMMD Sengkuyung I di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan pada tanggal 15 Maret s.d 14 April 2020;
 - 3) Terlaksananya TMMD Sengkuyung II di Desa Metawana Kecamatan Pagentan pada tanggal 30 Juni s.d 30 Juli 2020;
 - 4) Terlaksananya TMMD Sengkuyung III di Desa Dawuhan Kecamatan Madukara pada tanggal 22 September s.d 21 Oktober 2020.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan. Kegiatan ini memiliki output yaitu jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya sebanyak 20 UPK. Rincian kegiatan sebagai berikut :
- 1) Terlaksananya kordinasi dan monitoring pengelolaan keuangan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) UPK s.d Juni 2020;
 - 2) Terlaksananya rekapitulasi data pengelolaan keuangan UPK sampai dengan Triwulan IV 2020.
3. Program Peningkatan Perencanaan pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan, dengan output yaitu keluaran jumlah dokumen kawasan yang tersusun sebanyak 4 dokumen kawasan. Rincian kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksananya bimtek pembangunan kawasan perdesaan tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - Terlaksananya rapat pengembangan kawasan wisata perdesaan Kawisesa Kec. Sigaluh (Desa Tunggoro, Randegan, Gembongan, Kemiri).
 - Terlaksananya rapat pengembangan kawasan wisata perdesaan Pajang Kalola Kec. Banjarmangu (Desa Gripit, Pekandangan, Kalilunjar, Sipedang);
 - Tersusunnya dokumen Kawasan Perdesaan untuk Pajang Kalola berupa : (1) Perdes Kerjasama Desa, (2) SK Kades Tentang Kepengrusan Badan/lembaga Kerjasama Desa, (3) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa, (4) SK Bersama Kepala Desa tentang Kepengurusan BKAD;
 - Terlaksananya rapat koordinasi kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan dalam rangka fasilitasi batas desa untuk 12 kelurahan dan 53 desa;
 - Terlaksananya pengumpulan data tracking batas desa bagi 65 desa/kelurahan di 4 kecamatan baik menggunakan kartometrik maupun aplikasi di lapangan;
 - Terlaksananya penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan Penegasan Batas Desa di 65 Desa/Kelurahan pada 4 kecamatan.
- b. Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan
- Indikator persentase speningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan dipilih untuk seberapa besar peranan perempuan dalam pembangunan di

perdesan. Capaian kinerja peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.21.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	26%	30,87%	118,74%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan pada tahun 2020 diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum TP\,PKK\,yang\,didampingi}{\sum TP\,PKK\,Desa\,dan\,Kelurahan + TP\,PKK\,Kecamatan} \times 100\% \\ &= \frac{56 + 36}{298} \times 100\% \\ &= \frac{92}{298} \times 100\% \\ &= 30,87\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan peran perempuan di perdesaan dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan kader TP PKK di 36 desa/kelurahan wilayah binaan di 20 kecamatan serta TP PKK 20 Kecamatan. Tujuan pembinaan yaitu terlaksananya 10 Program Pokok PKK yang implementasinya dilaksanakan kaum perempuan di perdesaan.

Peningkatan peran perempuan juga didukung dengan terdampingnya kegiatan Revitalisasi Posyandu. Pada Tahun 2020, dilaksanakan peningkatan kapasitas kader Posyandu yang dilaksanakan secara bergiliran di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara. Dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang didukung pula oleh pendampingan Posyandu diharapkan menjadi sumbangsih pembangunan perdesaan yang dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga oleh kaum perempuan.

Desa yang termasuk pada wilayah binaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.22. Daftar TP PKK Desa Yang Dibina Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
1.	Susukan	Gumelem Wetan, Panerusan Kulon
2.	Purwareja Klampok	Kalmpok
3.	Mandiraja	Kaliwungu, Sumbang
4.	Purwanegara	Purwonegoro, Parakan
5.	Bawang	Majalengka, Winong
6.	Banjarnegara	Karangtengah, Semarang
7.	Sigaluh	Wanacipta, Gembongan
8.	Madukara	Pagelak, Clapar
9.	Banjarmangu	Sijeruk, Kalilunjar
10.	Wanadadi	Medayu, Lemah Jaya

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
11.	Rakit	Luwung, Situwangi
12.	Punggelan	Sawangan, Tribuana
13.	Karangkobar	Karanggondang, Purwodadi
14.	Wanayasa	Pandansari, Legoksayem
15.	Kalibening	Asinan, Sembawa
16.	Batur	Batur
17.	Pejawaran	Kalilunjar, Tlahab
18.	Pagentan	Majasari, Kalitlaga
19.	Pagedongan	Gentansari
20.	Pandanarum	Pandanarum

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan disbanding dengan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel. 3.23.

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	-	14,89%	14,89%	18,79%	30,87%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 21, Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan pada tahun 2020 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.. Capaian kinerja persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2018	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	30%	30,87%	102,9%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Tabel 3.24, target pada tahun 2022 dicapai persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan mencapai 30 persen. Pencapaian pada tahun 2020 dari target 2022 sebesar 102,9%, sehingga sudah memenuhi target.

Peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan, karena lingkup pembangunan terkecil dimulai dari keluarga. Perempuan mempunyai andil besar dalam manajemen keluarga untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas. Kaum perempuan juga mampu berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi

produktif. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di pedesaan sangat menunjang terwujudnya pemerataan pembangunan dan kemandirian desa.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

- 1. Meningkatnya kesadaran kader PKK dalam memotivasi anggotanya untuk mengimplementasikan 10 Prorgam Pokok PKK sebagai wadah peningkatan partisipasi perempuan dama pembangunan di perdesaan;
- 2. Pembinaan dan pendampingan terhadap kader PKK meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

- 1. Pendampingan secara berkelanjutan terhadap kader PKK.
- 2. Meningkatkan sasaran pendampingan dan pembinaan 10 Program Pokok PKK.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Peranan Kaum Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan	155.205.000	7	26%	149.976.350	7	30,87%	96,63	8	117,74%
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga,	155.205.000			149.976.350			96,63		
2	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	199.984.200			197.741.200			98,88		
	Kegiatan Revitalisasi Posyandu	199.984.200			197.741.200			98,88		
		344.000.000	7	26%	347.717.550	7	30,87%	97,75	100	117,74%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran secara optimal dan efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 117,74% dengan penyerapan keuangan sebesar 97,75%. Terdapat efisiensi 2,25% anggaran yang berasal dari efieisnsi belanja makan minum rapat serta perjalanan dinas dalam daerah.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang PNS terdiri dari Golongan III (S1 : 3 orang, SLTA : 1 orang), 1 orang PTT (SLTA) dan 2 orang

THL. Keseluruhan pelaksana tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan yaitu Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan dan Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan

Kegiatan Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga, dengan output yaitu Jumlah TP PKK (Kecamatan, desa dan kelurahan) yang dibina sebanyak 56 TP PKK. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya rapat pleno (3 kali), rapat pengurus (2 kali) dan monitoring dan evaluasi TP PKK wilayah binaan;
- b. Terlaksananya penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 (tukang becak, juru parkir, janda/duda dan fakir miskin) sebanyak 400 paket;
- c. Terlaksananya rapat pokja 1 sd 4 terkait evaluasi hasil binaan wilayah;
- d. Terlaksananya monitoring Gerakan Perempuan Tanam dan Peliharaan Pohon (GPTPP) pada 7 kecamatan (Sigaluh, Banjarnegara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok dan Susukan);
- e. Terpilihnya juara lomba GPTPP/Inovasi Taman yaitu Juara I : Dinas Kesehatan, Juara II : Dinas Perhubungan, Juara III : DINDIKPORA, Juara Harapan I : DISPERMADES PPKB, Juara Harapan II : BPBD, Juara Harapan III : BPPKAD.

2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan output sebagai berikut :

- Terlaksananya rakor pokjanal posyandu;
- Terlaksananya peningkatan kapasitas kader Posyandu di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan posyandu.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan

Sasaran meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun. Indikator ini dipilih untuk mengetahui data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek demografi di Kabupaten Banjarnegara. Adapun realisasi kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.26. Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	100%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah , 2020

Berdasarkan data di atas, realsasi kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun mencapai 100 persen. Total jumlah kepala keluarga yang dilaksanakan pendataan sebanyak 304.733 kepala keluarga. Realisasi kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun pada Tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27. Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun	100% (303.183 KK)	100% (305.928 KK)	100% (304.733 KK)	100% (337.883 KK)

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun dapat mencapai target 100 persen dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Teknis penyediaan data mikro keluarga dilaksanakan melalui sensus atau pemutakhiran. Tahun 2020, penyediaan data mikro keluarga dilaksanakan melalui pemutakhiran data sebelumnya. Informasi data mikro keluarga memuat data identitas keluarga, ksertaan KB serta indikator pembangunan keluarga. Capaian kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun	100%	100%	100%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

Komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak baik masyarakat, pengurus RT, RW, aparat desa dan kecamatan serta petugas pendataan PPKBD dalam penyusunan dan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap jenjang pendataan pada seluruh wilayah serta meningkatkan koordinasi dan pendampingan petugas pendataan sehingga kuntitas dan kualitas data yang tersusun akurat dan tepat waktu.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.29 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indika tor	Dana (Rp)	SDM	Indikato r	Dana	SDM	Indikato r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Keluarga Berencana	10.000.000	3	100%	10.000.000	3	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyusunan Paramater Kependudukan	10.000.000			10.000.000			100%		
2	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	9.518.000			9.518.000			100%		
	Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	9.518.000			9.518.000			100%		
		19.518.000	3	100%	19.518.000	3	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 100% dengan penyerapan keuangan sebesar 100% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 3 orang PNS Golongan III (S1 : 2 orang, SLTA : 1 orang) dan 1 orang THL. Dalam pelaksanaan tugas pengumpulan data di lapangan dibantu oleh Petugas Penyuluh KB, Petugas Pembantu

Pembina KB Desa (PPKBD) dan Petugas Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD) di 20 kecamatan. Keseluruhan pelaksana tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun dicapai melalui Program Keluarga Berencana dan Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
 - a. Kegiatan Penyusunan Paramater Kependudukan, dengan output yaitu keluaran jumlah Feed Back (Laporan Bulanan) sebanyak 12. Rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi Program KKBPK dengan BKKBN dan DP2KBP3A Prov. Jateng;
 - Terlaksananya rapat penyusunan grand desain kependudukan;
 - Tersusunya dokumen Feed Back untuk bulan Januari s.d Dseember 2020.
2. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan, dengan output yaitu jumlah IMP yang Aktif di desa/ Kelurahan sebanyak 7.134 IMP dan Jumlah IMP Mandiri di desa sebanyak 2.150 IMP. Rincian kegiatan sebagai berikut :

 - a. Terlaksananya kordinasi dan pembinaan terkait peran bantu IMP dalam bangga kencana bagi Penyluluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD di 17 kecamatan.;
 - b. Terlaksananya koordinasi dan monitoring dan evaluasi IMP;
 - c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan IMP.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kesertaan KB

Sasaran meningkatnya kesertaan KB, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Angka Kelahiran Total (TFR).
- b. Persentase peserta KB aktif.
- c. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need).
- d. Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun).

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Angka Kelahiran Total (TFR)

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dipilih untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam masa reproduksinya di Kabupaten Banjarnegara.. TFR dapat dipakai sebagai indikator untuk meunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan sosial ekonomi, keberhasilan Program KB, sebagai bahan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin serta program pengendalian penduduk. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah terutama wanitanya serta tingkat sosial ekonomi yang rendah. Oleh karena itu menurunnya TFR masih terus diupayakan di Kabupaten Banjarnegara dengan target akhir RPJMD sebesar 2,3. Realisasi kinerja indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	2,108	109,108

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Angka Kelahiran Total (TFR) dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Anak Lahir Tahun } N}{\sum \text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun}/1000} \times 140$$

(Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara)

$$= \frac{15.455}{1.026.633} \times 140$$
$$= 2,108$$

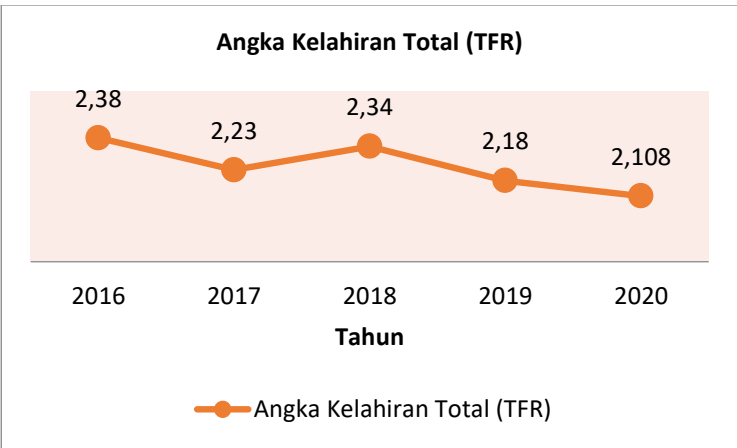
Keterangan :

- 1) Sumber data jumlah kelahiran : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
 - 2) Sumber data jumlah penduduk : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banjarnegara
- Berdasarkan data di atas, realisasi Angka Kelahiran Total sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Angka Kelahiran Total 2,108 artinya rata-rata wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya melahirkan 2,108 atau bisa dimaknai 2 - 3 anak. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TFR menunjukan tren yang positif. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan penggerakan dan KIE KB yang mampu meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, peningkatan jumlah peserta KB aktif dan menurunnya PUS usia 15-19 tahun. Capaian kinerja Angka Kelahiran Total dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,38	2,23	2,34	2,18	2,108

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020



Gambar 3.6. Angka Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan Tabel 3.31, Angka Kelahiran Total memiliki trend yang positif. Capaian tahun 2018 menurun (angka kelahiran meningkat) dan capaian meningkat kembali (Angka Kelahiran menurun) sampai dengan Tahun 2020. Realisasi kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan dalam tabel 3.32.

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	2,108	109,108

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Tabel 3.32, Capaian Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2020 dibandingkan target capaian akhir Renstra pada tahun 2022 sudah memenuhi bahkan melebihi target dengan capaian 109,108 persen. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Target Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Target Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Target Prov.Jateng	Banjarnegara
1	2	3	4
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,05	2,108

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Banjarnegara di atas realisasi Provinsi Jawa Tengah. Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan target nasional disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional 2020	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,26	2,108	107,21%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Tabel 3.34, Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2020 dibandingkan nasional tahun 2020, Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi target nasional dengan capaian 107,21 persen. Perbandingan realisasi TFR Kab. Banjarnegara di bandingkan dengan realisasi TFR Prov. Jawa Tengah dan nasional disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35 Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Nasional	Prov.Jateng	Banjarnegara
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,45	2,27	2,108

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian angka TFR Kab. Banjarnegara Tahun 2020 di atas capaian provinsi dan nasional. Capaian tersebut bisa sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Terlaksananya kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) mengenai pentingnya ber-KB kepada PUS dalam pembangunan keluarga dalam rangka mengendalikan angka kelahiran;
2. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB bagi Petugas Penyuluh KB dalam melaksanakan pelayanan pembinaan KB;
3. Pelayanan yang tepat sasaran dan pembinaan yang berkesinambungan mulai dari Petugas Penyuluh KB, Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD sehingga pembinaan dan penggerakan KB menjangkau seluruh wilayah;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui penyediaan, pemetaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat kepada 43 KKB di Kabupaten Banjarnegara;
5. Terlaksananya kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan KIE KB pasca persalinan dan pasca keguguran melalui pembentukan kelas ibu hamil;

- 6. Kesadaran pasangan usia subur yang semakin tinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi modern sehingga tingkat kegagalan semakin rendah;
- 7. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bangga Kencana dengan mitra kerja.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

- 1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) baik bagi petugas maupun kelompok kegiatan;
- 2. Meningkatkan ketersediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi;
- 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB dalam rangka optimalisasi kinerja Progam Keluarga Berencana;
- 4. Pemetaan kebutuhan serta menjaga ketersediaan alat kontontrasepsi pada setiap KKB di Kabupaten Banjarnegara;
- 5. Pemenuhan operasional kebutuhan Balai Keluarga Berencana dalam rangka optimalisasi kinerja Penyuluh KB;
- 6. Optimalisasi kinerja dan pendidikan keluarga berencana pada Kampung KB;
- 7. Penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak dan fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 8. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi/Lembaga/Mitra Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.36 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Keluarga Berencana	6.837.411.000	11	2,30	6.483.404.017	11	2,108	93,46%	100%	109,108 %
	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	29.661.000			29.654.551			99,98%		
	Kegiatan DAK Bidang KB	1.162.802.000			967.649.200			83,22%		
	Kegiatan Operasional Keluarga Berencana	5.644.948.000			5.486.100.266			97,19%		

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal dan efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang

sebesar 109,108% dengan penyerapan keuangan sebesar 93,46% serta pemanfaatan sumberdaya yang sangat optimal. Terdapat efisiensi sebesar 6,54% yang sebagian besar berasal dari belanja pengadaan Lemari Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pengadaan Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 9 orang PNS terdiri dari Golongan IV (S2 : 3 orang) Golongan III (S1 : 5 orang, SLTA : 1 orang) dan 2 orang THL. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 46 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang mendukung Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu Program Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) kegiatan. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

Program Keluarga Berencana

1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dengan output yaitu jumlah keluarga miskin yang terlayani KB sebanyak 289 akseptor. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya Rakornis Muslimat NU dan Aisyiyah;
- Terlaksananya pelayanan
- bagi 289 akseptor KB (110 IUD dan 179 Implant) dari target kinerja 290 akseptor KB;
- Terlaksananya monitoring pelayanan satu juta akseptor dalam rangka Harganas ke 27 Tahun 2020.

2. Kegiatan DAK Bidang KB, dengan output sebagai berikut :

jumlah Pembangunan/Pengembangan/Alih fungsi Balai Penyuluhan KB sebanyak 2 paket :

- jumlah Pembangunan/Pengembangan/Alih fungsi Balai Penyuluhan KB sebanyak 2 paket
- jumlah pengadaan sarana pendataan sebanyak 2 paket;
- Jumlah pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan sebanyak 3 paket;
- jumlah sarana kerja lapangan KB sebanyak 5 paket;

Rincian Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya pembuatan pagar keliling Balai KB Kec. Sigaluh (CV.Arthavest) tanggal 31 Juli 2020 dan Bawang (CV. Cakra Radha) pada tanggal 12 Agustus 2020 dan monitoring pagar keliling.

- Terlaksananya Pengadaan Lemari Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi (CV. Bangun Abadi) pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Terlaksananya Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB, BKL Kit, GENRE Kit dan KIE Kit (CV. Bangun Abadi) pada tanggal 26 Agustus 2020) serta monitoring hasil pengadaan;
- Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor melalui *e-Purchasing* (CV. Anugrah Pratama) pada tanggal 30 Juli 2020 serta monitoring hasil pengadaan;
- Terlaksananya Pengadaan PC dan Printer melalui *e-Purchasing* (CV. Anugrah Pratama) pada tanggal 30 Juli 2020 serta Pengadaan Leaflet, Display data, Rak Buku dan Papan Nama Rumah Data Kependudukan oleh GAC Grafis pada tanggal 29 Juli 2020 serta monitoring pengadaan;
- Terlaksananya tender oleh ULP untuk Sarana Kerja PKB/PLKB, (CV. Bangun Abadi) pada tanggal 26 Agustus 2020) dan *e-purchasing* pengadaan smartphone (CV. Anugrah Pratama) pada tanggal 30 Juli 2020) serta monitoring hasil pengadaan;

3. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana, dengan output sebagai berikut :

- Balai Keluarga Berencana yang mendapat bantuan operasional KB sebanyak 20 balai;
- Klinik Keluarga Berencana yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi sebanyak 43 klinik KB;
- Kampung KB yang melaksanakan integrasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan lainnya sebanyak 64 Kampung KB;
- Kampung KB yang mendapat bantuan operasional KB 58 Kampung KB;
- Penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak, elektronik (siaran radio) dan media visual (Mural) pada 10 Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan (Susukan, Banjarnegara, Pagedongan, Banjarmangu, Wanadadi, Rakit, Karangobar, Batur dan Dispermades PPKB).

b. **Persentase Peserta KB Aktif.**

Indikator Persentase Peserta KB Aktif untuk mengetahui jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja indikator Persentase Peserta KB Aktif pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	78,24%	80,24%	102,56%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Indikator Peserta KB Aktif dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Peserta KB Aktif}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

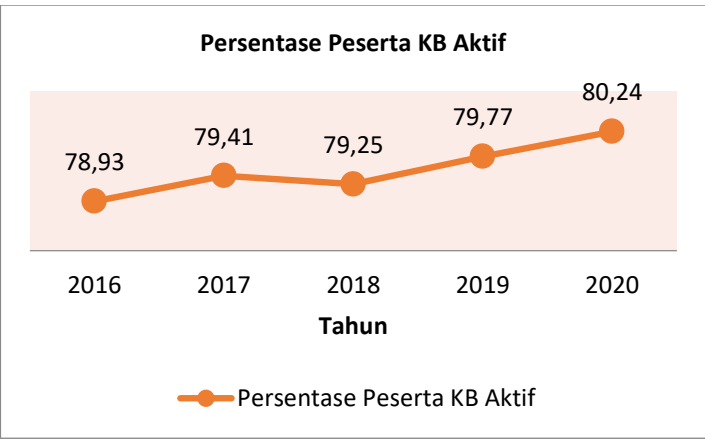
$$\begin{aligned} &= \frac{172.255}{214.688} \times 100\% \\ &= 80,24\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, realisasi persentase peserta KB aktif telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 102,51 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase peserta KB aktif memiliki trend yang positif. Berbagai upaya teknis dilaksanakan diantaranya sosialisasi dan promosi yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk mengoptimalkan pergerakan pelayanan KB. Capaian pesentase KB aktif Tahun 2020 di Kab. Banjarnegara (80,24%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (72,91%). Di samping itu, realisasi persentase KB aktif juga tertinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Realisasi kinerja indikator persentase KB aktif tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peserta KB Aktif	78,93	79,41	79,25	79,77	80,24

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020



Gambar 3.7. Persentase Pesera KB Aktif Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan Tabel 3.38, realisasi kinerja persentase KB aktif di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki trend yang meningkat. Persentase peserta KB aktif dipengaruhi oleh :

1. Peningkatan PUS baru;
2. Meningkatnya D.O (*drop out*) peserta KB (hamil, menopause, ingin anak segera, dll)

Realisasi kinerja persentase KB aktif dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	79,24	80,24	101,262

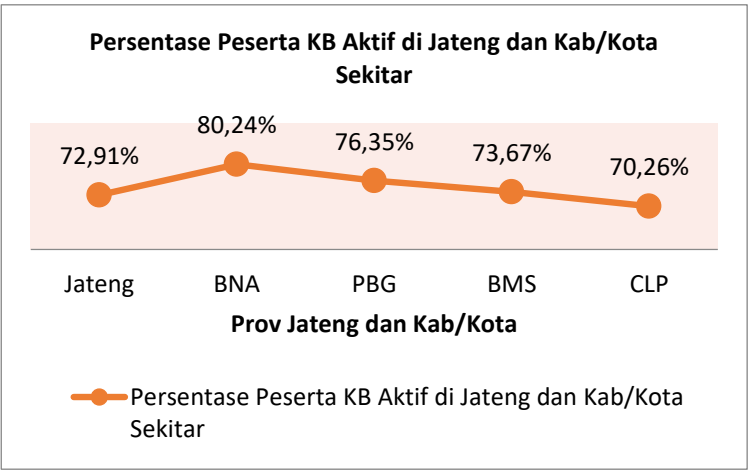
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan Tabel 3.39, menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase KB aktif sudah memenuhi bahkan melebihi target tahunan bahkan target akhir Renstra dengan capaian 101,262 persen. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sangat efisien dalam pelaksanaan dan optimal dalam hasil. Perbandingan realisasi kinerja peserta KB aktif dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten di wilayah sekitar disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	Prov.Jateng	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peserta KB Aktif	72,91%	80,24%	76,35%	73,67%	70,26%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020



Gambar 3.8. Persentase Pesera KB Aktif di Jawa Tengah dan Kab/kota sekitar

Berdasarkan Tabel 3.40 menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase peserta KB aktif di Kabupaten Banjarnegara merupakan capaian tertinggi diantara kabupaten sekitar maupun Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinnggi persentase peserta KB aktif, maka semakin terkendalnya angka kelahiran total. Realisasi kinerja persentase KB aktif dibandingkan dengan target nasional disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	61,78%	80,24%	129,49

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.41, menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase KB aktif sudah memenuhi target kinerja Renstra pada tahun berjalan bahkan capaian di atas target nasional dengan capaian 129,49%. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sangat efisien dalam pelaksanaan dan optimal dalam hasil. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat memuaskan.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB melalui penguatan Tim Jaga Mutu KB;
2. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan pada 43 Fasilitas Kesehatan di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara;
3. Pelayanan KB momentum Bakti Sosial Aisyiyah dan Muslimat NU, Bhayangkara, TMKK (Tentara Manunggal KB Kes);
4. Pelayanan satu juta akseptor dalam rangka Harganas ke 27 Tahun 2020 pada 23 Agustus sampai dengan 16 September 2020 dengan total 401 pelayanan MKJP (143 IUD dan 258 Implant) yang dilaksanakan oleh semua fasilitas kesehatan dan bidan desa dan dibantu oleh PPKBD dalam pelayanan kondom dan Pil.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Fasilitasi dan penguatan Tim Jaga Mutu dalam rangka peningkatan kualitas pelayan KB;
2. Monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah *Stock Out* Alokon bersama dengan Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alokon;
3. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi pergerakan KB;
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan KB pada Fasilitas Kesehatan dan jejaringnya;
5. Pemantapan promosi dan konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui Fasilitas Kesehatan, Balai Penyuluhan KB dan Kelompok Kegiatan KB.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peserta KB Aktif digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.42 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peserta KB Aktif

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Pemasangan Konstrasepsi	50.124.650	4	79,24 %	35.795.053	4	80,24	71,28%	100%	101,262 %
	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	50.124.650			35.795.053					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 101,262% dengan penyerapan keuangan sebesar 71,28% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang) dan Golongan III (S1 : 2 orang). Selain itu dala pelaksanaan kegiatan di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 46 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang sangat potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Persentase Peserta KB Aktif dicapai melalui Program Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dengan 1 (satu) Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. Output kegiatan sebagai berikut :

- jumlah peserta KB MOW yang difasilitasi sebanyak 25 akspetor tidak sesuai target sebanyak 27 akseptor;
- Jumlah peserta KB MOP yang difasilitasi sebanyak 2 akseptor sesuai target sebanyak 2 akseptor. dari kegiatan pendukung sebagai berikut :

c. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Indikator cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) untuk mengetahui jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja indikator Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43. Capaian Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	7,01%	6,91%	101,45%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Indikator Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah (Pasangan Usia Subur tidak KB) ial + tial}}{\text{Jumlah PUS (usia 15 – 49)}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

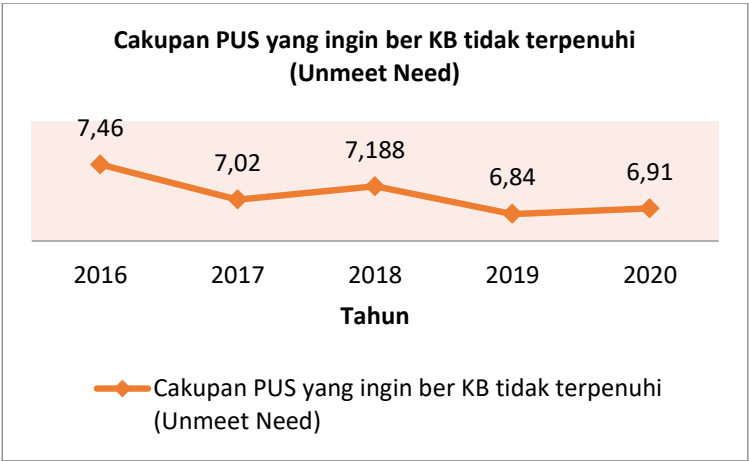
$$\begin{aligned} &= \frac{7.332 + 7.504}{214.688} \times 100\% \\ &= \frac{14.836}{214.688} \times 100\% \\ &= 6,91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 101,45 persen. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi *Unmet Need* memiliki tend yang positif. Sebagaimana tahun sebelumnya, tahun 2020 Kab. Banjarnegara menempati peringkat terbaik pertama untuk capaian angka *Unmet Need*. Rendahnya angka *Unmet Need* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan tingginya prevalensi kontrasepsi yang berakibat menurunnya angka kelahiran total (TFR). Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	7,46%	7,02%	7,188%	6,84%	6,91%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020



Gambar 3.9. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)

Berdasarkan Tabel 3.44, menunjukkan realisasi cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) memiliki kecenderungan menurun (semakin baik). Hal-hal yang mempengaruhi PUS ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi tidak ber-KB diantaranya : (1) suami jauh dari rumah (bekerja di luar kota/pulau) dan (2) persepsi PUS bahwa sudah tidak subur lagi sehingga tidak perlu ber-KB. Realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	6,99%	6,91%	101,158%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.45, menunjukkan bahwa capaian kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) sudah memenuhi target tahunan bahkan target akhir Renstra. Rendahnya angka *Unmeet Need* berarti kesadaran berKB semakin tinggi dan semakin baik bagi pengendalian angka kelahiran total. Hal tersebut berarti bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta jajarannya telah melaksanakan program dan kegiatan dengan sangat optimal. Realisasi cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di wilayah sekitar disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	Prov.Jateng	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Cilacap
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	12,86%	6,91%	10,56%	13,30%	12,61%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa capaian cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Kabupaten Banjarnegara memiliki capaian terbaik (*Unmeet Need* terendah) baik dengan kabupaten pembanding maupun provinsi. Realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dibandingkan dengan Target Nasional disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	9,9%	6,91%	143,27%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.46, menunjukkan bahwa realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) sudah memenuhi bahkan melampaui target nasional. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah baik karena mampu melebihi target nasioal.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Penentuan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan KIE dan pembinaan KB yaitu pada kelompok yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi namun mereka belum menggunakan alat kontrasepsi;
2. Ketersediaan informasi dan KIE penggunaan kontrasepsi yang tepat dan menjangkau segmentasi sasaran oleh aparat dengan dibantu Petugas Lapangan KB, PPKB dan PLKB, sehingga jangkauan identifikasi *unmet need* dapat menyeluruh;
3. Kejasama dengan fasilitas kesehatan dengan dibantu bidan desa dalam membentuk kelas *unmet need*.
4. Ketersediaan data pelayanan KB yang akurat dan up to date sebagai dasar penentuan kebijakan yang tepat dalam menjangkau sasaran program.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Melaksanakan pendataan dan penetapan kelompok sasaran secara berkala dan *up to date* serta menyeluruh terhadap kelompok yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi;
2. Meningkatkan pembinaan dan konseling terhadap kelompok yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi;

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.48 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Keluarga Berencana	11.142.500	4	7,01%	11.141.568	4	6,91%	99,99%	100%	101,45%
	Pembinaan Keluarga Berencana	11.142.500			11.141.568					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal dan efisien. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 101,45% dengan penyerapan keuangan sebesar 99,99% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang) dan Golongan III (S1 : 2 orang). Selain itu dala pelaksanaan pembinaan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 46 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang sangat potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dicapai melalui Program Keluarga Berencana dengan 1 (satu) kagiatan. Output Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pada tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, output yaitu jumlah PUS tidak ber KB sebanyak 42.433 orang. RIncian kegiatan sebagai berikut :
- a. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi KB Pria dan monitoring kegiatan;

b. Terlaksananya pembinaan dan monev capaian akseptor KB ke Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB;

c. Terlaksananya koordinasi ke Kantor Perwakilan BKKBN Provimsi Jawa Tengah terkait Pembinaan KB.

d. Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun)

Indikator ini untuk mengetahui persentase PUS usia 15-19 tahun di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun) pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.49. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,792%	1,724%	161,83%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Indikator menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

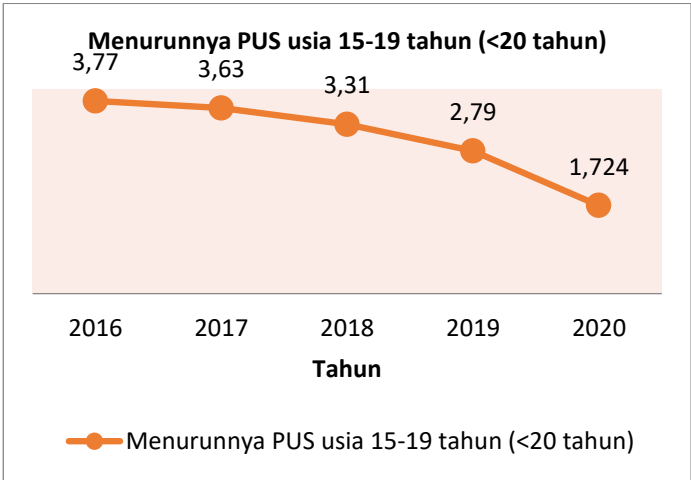
$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} < 20 \text{ Th}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\% \\ &= \frac{3.702}{214.668} \times 100\% \\ &= 1,724\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, capaian menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 161,83%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) memiliki *trend* yang positif dan cukup signifikan. Capaian tersebut tidak terlepas dari promosi, sosialisasi dan pendampingan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja kepada remaja maupun korang tua yang memiliki remaja baik melalui jalur formal maupun informal. Upaya teknis yang telah dilaksanakan diantaranya pembinaan melalui pertemuan rutin Saka Kencana, pendampingan kepada kelompok kegiatan PIK Remaja serta sosialisasi pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	3,77%	3,63%	3,31%	2,79%	1,724%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020



Gambar 10. Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) memiliki kecenderungan menurun. Realisasi kinerja mengalami peningkatan (penurunan PUS usia <20 tahun) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Membandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2019	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,87%	1,724%	166%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, realisasi menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) sudah memenuhi target renstra tahunan bahkan target akhir tahun renstra.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Penetapan sasaran yang tepat dalam pembinaan kepada kelompok remaja baik melalui jalur formal maupun non formal tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, bahayanya seks pra nikah dan napza;
2. Meningkatnya kesertaan kelompok Tri Bina khususnya Bina Keluarga Remaja, berdampak pada meningkatnya pengetahuan orang tua dalam mempersiapkan anak remaja menjadi generasi berencana.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Meningkatkan pendidikan keluarga berencana kepada generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan Saka Kencana;
2. Pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sebagai wadah pendidikan keluarga berencana bagi remaja;
3. Promosi dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada kelompok keluarga yang mempunyai anak usia remaja.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.52. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	4.843.250	3	2,97%	4.843.250	3	1,724%	100%	100%	161,83 %
	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang	4.843.250			4.843.250			100,%		

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan Reproduksi Remaja									
2	Program Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.075.700			1.075.700			100%		
	Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	1.075.700			1.075.700			100,%		
		5918.950	3	2,97%	5918.950	3	1,724%	94,19%	100%	161,83

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 161,83% dengan penyerapan keuangan sebesar 100% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang) dan Golongan II (SLTA : 1 orang). Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang sangat potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) dicapai melalui melalui 2 (dua) Program yaitu Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Output Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pada tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan output yaitu jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19 sebanyak 3 kali. Rincian kegiatan sebagai berikut :

 - a. Terlaksananya latihan rutin pramuka (Saka Kencana) s.d bulan Maret 2020 (3 kali);
 - b. Terlaksananya monitoring dan pembinaan Kelompok Remaja di Kecamatan Bawang.
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, dengan output yaitu pembinaan, monitoring dan evaluasi PIK Remaja.

Sasaran 7 : Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat. Adapun realisasi kinerja indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.53. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	77	90,38	117,38%

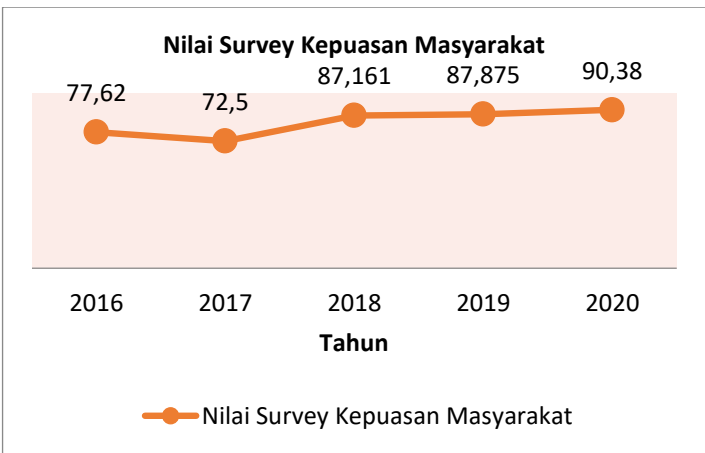
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.53, realisasi nilai survey kepuasan masyarakat telah melebihi target dengan capaian 117,17 persen. Pelayanan yang diberikan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pengguna layanan sudah sesuai yang diharapkan pada tahun bersangkutan. Namun demikian capaian tersebut masih perlu ditingkatkan kembali minimal realisasi sama dengan target kinerja yang ditetapkan di tahun berikutnya. Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	77,62	72,5	87,161	87,875	90,38

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020



Gambar 3.11. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dispermades PPKB

Berdasarkan Tabel 3.54, realisasi nilai survey kepuasan masyarakat menunjukkan trend yang meningkat, artinya kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Realisasi kinerja persentase nilai survey indeks kepuasan masyarakat dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2018	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	80	90,38	112,98%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 3.55 realisasi nilai survey kepuasan masyarakat dibandingkan dengan target akhir Renstra maka sudah memenuhi bahkan melebihi target akhir. Dengan demikian pemberian pelayanan kepada para pengguna layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah sangat memuaskan berdasarkan nilai akhir Renstra.

Survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu program dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. masyarakat Laporan hasil survey ini sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan public secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masyarakat/desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan pada saat penyelenggara (Dispermades PPKB) melaksanakan kegiatan di lapangan ataupun pada saat responden melaksanakan koordinasi, rapat dan atau kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan perhitungan, nilai survey indeks kepuasan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 diperoleh nilai 90,38 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.56. Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	2	3
1	Persyaratan	3,770
2	Prosedur	3,633
3	Waktu Pelayanan	3,133
4	Biaya / Tarif	3,800
5	Produk Layanan	3,733
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,400
7	Perilaku Pelaksanaan	3,767
8	Maklumat Pelayanan	3,800
9	Penanganan Pengaduan	3,533

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah , 2020

Indeks pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 3,615. Apabila nilai tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25 maka hasilnya 90,382. Berdasarkan angka tersebut, mutu pelayanan adalah A dengan kinerja pelayanan dikategorikan Baik Sekali. Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat di atas target nilai 77.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

- 1. Koodinasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pihak-pihak terkait dengan pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2. Komitmen dari aparat penelenggara pelayanan (Dispermades PPKB) dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

- 1. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas produk layanan;
- 2. Koordinasi intensif dengan pemerinta pusat maupun kabupaten terkait produk pelayanan;
- 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada semua unsur pelayanan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.57 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	897.372.691	17	75	828.667.468	17	90,39	92,34%	100%	112,98 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.200.000			73.192.723			68,28%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.200.000			55.200.000			100,00%		
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000			16.050.0800			94,41%		
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.500.000			146.784.281			93,79%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	560.472.691			536.440.464			95,71%		
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	362.750.000			342.778.375			94,49%		
	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	76.750.000			63.773.500			83,09%		

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	206.000.000			200.855.500			97,50%		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	80.000.000			78.149.375			97,69%		
		1.260.122.691	17	75	1.171.445.843	17	93,38	93,42%	100%	112,98 %

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 112,98% dengan penyerapan keuangan sebesar 93,42% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,58% yang berasal dari efisiensi belanja listrik, air, telepon dan internet serta efisiensi pengadaan perlengkapan kantor.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 14 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S1 : 1 orang) dan Golongan III (S1 : 5 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 3 orang, SLTP : 2 orang) dan THL : 5 orang. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran kinerja menurunnya nilai survey indeks kepuasan masyarakat dicapai melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Output Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pada tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output yaitu terlaksananya pembayaran telepon, speedy air dan listrik sebanyak 12 bulan..
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan output yaitu jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar sebanyak 12 bulan.
 - c. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output yaitu alat kebersihan dan pembersihan kantor yang terpenuhi sebanyak 12 bulan.
 - d. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output yaitu jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi sebanyak 12 bulan.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, dengan output yaitu jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi sebanyak 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan output yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi sebanyak 12 bulan. Rincian

- kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa lemari es (2 unit), dispenser (1 unit), laptop (3 unit), scanner (1 unit) dan printer (3 unit).
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan output yaitu jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 3 unit (Dispermades PPKB, eks DPPKBP3A, Gedung PKK). Rincian pelaksanaan kegiatan yaitu rehabilitasi dapur kantor dan kamar mandi dan eternit melalui anggaran APBD murni, terlaksananya rehabilitasi tempat penampungan air pada Gedung PKK, pembuatan taman dan kamar mandi PKK, pembuatan rumah Genset, pemindahan Genset beserta instalasinya, rehab taman Dispermades PPKB, rehab ruang kerja, pemasangan kanopi parkir kendaraan.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan output yaitu jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 12 bulan. Rincian pelaksanaan kegiatan yaitu pemeliharaan perlengkapan gedung berupa AC 7 unit, Laptop 2 unit, Printer 2 unit dan pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 11 unit, serta pembayaran pajak kendaraan sebanyak 11 unit s.d bulan Desember 2020.

Sasaran 8 : Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi target indikator kinerja pada tahun 2020 dapat digambarkan pada Tabel :

Tabel 3.58. Realisasi Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (60)	BB (74,05)	123,42%

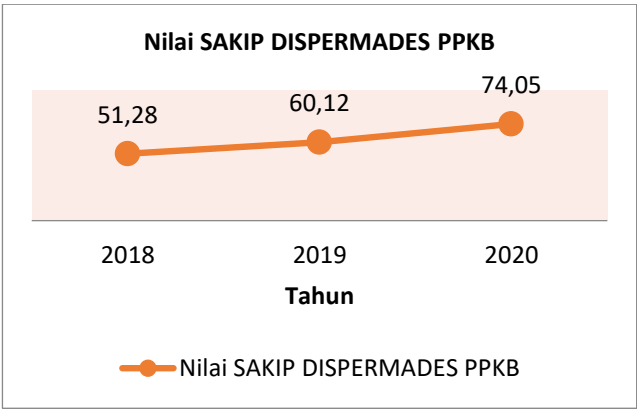
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.58, realisasi Nilai Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah memenuhi target dengan capaian 100 persen. Hasil tersebut menandakan kegiatan yang mendukung realisasi kinerja berhasil dengan baik. Realisasi Nilai Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59. Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	CC (51,28)	B (60,12)	BB (74,05)

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020



Gambar 3.12. Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara

Berdasarkan Tabel 3.59, nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan lebih baik dan sistematis dari tahun sebelumnya. Realisasi kinerja meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60. Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2020	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70,00)	BB (74,05)	105,71%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3.60, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah memenuhi target akhir Renstra bahkan mendekati target

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014). Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0** s.d **100**. Penyelenggaraan Sistem AKIP meliputi :

- 1. Rencana strategis
- 2. Perjanjian kinerja
- 3. Pengukuran kinerja
- 4. Pengelolaan data kinerja
- 5. Pelaporan kinerja;
- 6. Review dan evaluasi kinerja

Sasaran Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD. Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 memperoleh nilai 74,05 dengan kategori BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari :

Tabel 3.61. Nilai Sistem AKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara Tahun 2018 - 2020

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	14,87	19,41	23,76
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,07	15,31	16,56
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,09	9,99	12,31
4	Evaluasi Internal	10%	2,92	6,04	5,36
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	8,33	9,37	10,05
Penilaian		100%	51,28	60,12	74,05

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2020

Meskipun sudah mencapai target yang ditetapkan namun perlu untuk terus peningkatan dan perbaikan karena nilai yang diperoleh masih rendah dan belum mencerminkan system perencanaan yang seharusnya. Penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **23,76** dari bobot **30%**. Penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja meliputi penilaian terhadap pemenuhan, kualitas serta implementasi Renstra dan perencanaan kinerja tahunan (RKT dan PK). Kelemahan-kelemahan dokumen perencanaan kinerja terdiri atas :

- a. Rencana Tahunan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- b. Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **14,56** dari bobot penilaian sebesar **25%**. Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu 1). Pemenuhan Pengukuran, 2). Kualitas Pengukuran dan 3). Implementasi pengukuran. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan pada pengukuran kinerja :

- a. Pengumpulan data kinerja atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala;
- b. Hasil pengukuran atas capaian kinerja tingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar *reward and funishment*;
- c. Dokumen penganggaran belum mencantumkan IKU sebagai ultimate *outcome* atau *impact*.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **9,49** dari bobot penilaian sebesar **15%**. Evaluasi atas laporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pelaporan kinerja adalah :

- a. Laporan Kinerja belum menyajikan :
 - Data analisis dan efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan;
 - Data dan analisis keterkaitan capaian target dengan realisasi anggaran;
- b. Informasi yang disajikan dalam LKjIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.

4. Evaluasi Internal

Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kinerja memperoleh nilai **5,36** dari bobot penilaian sebesar **10%**. Evaluasi atas Evaluasi Kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu Pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pemanfaatan evaluasi adalah :

- a. Evaluasi atas program yang belum memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- b. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengendalian kinerja;

- c. Pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum memberikan saran alternatif untuk perbaikan kinerja setiap periode.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai **16,05** dari bobot penilaian sebesar **20%**. Evaluasi atas pencapaian sasaran /kinerja organisasi meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen yaitu kinerja yang dilaporkan (output) dan kinerja yang dilaporkan (outcome).

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

- 1. Tidak ada proses pengkumpulan dan pengkinian data yang dijadikan sebagai dasar perencanaan sehingga pengukuran kinerja sulit dilaksanakan;
- 2. Penetapan indikator kinerja tidak implemetatif dan menggunakan rumus yang sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga pengukuran capaian kinerja sulit dilaksanakan;
- 3. Terdapat beberapa sasaran yang dicapai melalui satu program sehingga capaian program tidak dapat diukur dengan jelas.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.62 Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	2	B	15.000.000	2	BB	100%	100%	123,42%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000			15.000.000					
		150.000.000	2	B	141.281.027	2	BB	100%	100%	123,42%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja sasaran telah sangat optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja yang sebesar 108,23% dengan penyerapan keuangan sebesar 94,19% serta pemanfaatan sumberdaya yang optimal.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari Golongan III (S2 : 1 orang), Golongan II (SLTA : 1 orang) dan THL : 1 orang. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD. Output kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD, dengan output jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebanyak 10 dokumen yaitu : Renja, LKPJ, LKJIP, RKT, Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, Pengukuran Kinerja sampai dengan Triwulan IV, Laporan POK sampai dengan bulan Desember 2020, RKA dan DPA Murni, Pergeseran dan Perubahan Tahun 2020.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp12.777.539.747,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp5.969.789.747,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.807.750.000,00. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp11.584.452.228,00 terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp5.130.702.762,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.453.749.466,00.

Dukungan anggaran yang diterima Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.130.350.247,00 dari jumlah total anggaran tahun 2019 Rp11.147.189.500,00. Namun jumlah anggaran Tahun 2020 sudah termasuk dengan Bantuan Jaminan Kesehatan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp3.525.000.000,00 yang mulai tahun 2020 melekat pada belanja Dispermades PPKB. Dengan demikian untuk operasional pelaksanaan kegiatan bisa dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi Dispermades Kab. Banjarnegara dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai upaya inovasi dan terobosan ditempuh agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa terlaksana sesuai rencana dan mencapai target kinerja.

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63 Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	897.372.691,00	828.667.468,00	92,34
1.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	107.200.000,00	73.192.723,00	68,28
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.200.000,00	55.200.000,00	100,00
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.000.000,00	16.050.0800,00	94,41
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	156.500.000,00	146.784.281,00	93,79
5.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)/THL	560.472.691,00	536.440.464,00	95,71
B.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	362.750.000,00	342.778.375,00	94,49
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	76.750.000,00	63.773.500,00	83,09
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	206.000.000,00	200.855.500,00	97,50
3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	80.000.000,00	78.149.375,00	97,69

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	214.325.000,00	208.719.148,00	97,38
	1. Pe mbekalan Aparatur Pemerintah Desa	214.325.000,00	208.719.148,00	97,38
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
E	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	43.725.000,00	43.560.185,00	99,62
	1. Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat	31.000.000,00	30.836.435,00	99,47
	2. Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa	12.725.000,00	12.723.750,00	99,99
F	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan	30.000.000,00	29.939.950,00	99,80
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	30.000.000,00	29.939.950,00	99,80
G	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	95.120.000,00	92.553.765,00	97,30
	1. Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa	94.000.000,00	92.433.765,00	97,27
	2. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	3. Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
H	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	125.000.000,00	124.980.000,00	99,98
	1. Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa	125.000.000,00	124.980.000,00	99,98
I	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	155.205.000,00	149.976.350,00	96,63
	Peningkatan Ketrampilan Manajemen Keluarga	155.205.000,00	149.976.350,00	96,63
J	Program Keluarga Berencana	6.858.553.500,00	6.504.545.603,00	94,84
	1. Penyediaan Pelayanan KB dan KK Miskin bagi Keluarga Miskin	29.661.000,00	29.654.551,00	99,98
	2. Pembinaan Keluarga Berencana	11.142.500,00	11.141.586,00	99,99
	3. DAK Bidang KB	1.162.802.000,00	967.649.200,00	83,22
	4. Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Lapangan	0,00	0,00	0,00
	5. Operasional Keluarga Berencana	5.644.948.000,00	5.486.100.266,00	97,19
	6. Penyusunan Parameter Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
K	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	4.843.250,00	4.843.250,00	100,00
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4.843.250,00	4.843.250,00	100,00

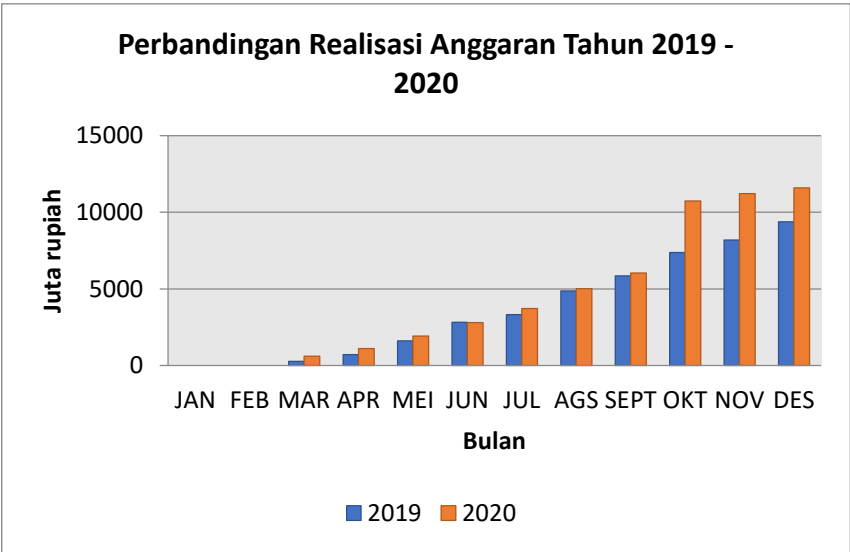
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
L	Program Pelayanan Kontrasepsi	50.124.650,00	35.795.053,00	71,28
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	50.124.650,00	35.795.053,00	71,28
M	Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	9.518.000,00	9.518.000,00	100,00
	Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	9.518.000,00	9.518.000,00	100,00
N	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.075.700,00	1.075.700,00	100,00
	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	1.075.700,00	1.075.700,00	100,00
O	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	199.984.200,00	197.741.200,00	98,88
	Revitalisasi Posyandu	199.984.200,00	197.741.200,00	98,88
P	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3.625.978.752,00	2.917.416.727,00	80,46
	1. Monitoring dan evaluasi keuangan desa	3.575.978.752,00	2.867.912.020,00	80,20
	2. Pendamping bantuan keuangan infrastruktur	50.000.000,00	49.504.707,00	99,01
Q	Program Pengembangan Data/Informasi	20.000.000,00	19.966.150,00	99,83
	Program Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	20.000.000,00	19.966.150,00	99,83
R	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	68.874.000,00	57.375.300,00	83,30
	Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah	68.874.000,00	57.375.300,00	83,30
Jumlah		12.777.539.747,00	11.584.452.228,00	90,66

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2020

Secara umum pengelolaan anggaran Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik. Pada tahun 2020 belanja Dispermades PPKB total sebesar Rp12.289.452.288,00 atau (96,18%), namun terdapat pengembalian iuran setoran Premi Asuransi Keehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp705.000.000,00. Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa terdapat belanja Premi Asuransi Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut yang dianggarkan sebesar Rp3.525.000.000,00 yang terbagi menjadi Premi yang menjadi tanggungan Pemberi Kerja atau pemerintah kabupaten sebesar (4%) atau Rp2.820.000.000,00 dan setoran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa (1%) sebesar Rp705.000.000,00. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019, yaitu 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayarkan oleh Peserta. Namun pada Tahun 2020 difasilitasi pembayarannya terlebih dahulu oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan, untuk kemudian

Kepala Desa dan Perangkat Desa menyetorkan kepada Pemerintah Kabupaten. Dispermades PPKB telah memfasilitasi pembayaran Premi Asuransi Kesehatan tersebut kepada BPJS secara keseluruhan baik yang 4% maupun 1%. Oleh karena itu, terdapat pengembalian dari setoran 1% yang berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa karena sebelumnya sudah difasilitasi pembayarannya terlebih dahulu. Dengan demikian terdapat penambahan pada sisa anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp705.000.000,00. Selain itu, rendahnya penyerapan anggaran juga karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa dimana nilai kontrak jauh di bawah nilai pagu anggaran.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyerapan tahun 2020 (90,66%) lebih besar dari tahun 2019 (84,14%). Dengan demikian pengelolaan anggaran tahun 2020 sudah lebih optimal dibanding Tahun 2019. Perbandingan penyerapan anggaran Tahun 2019 dan 2020 disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.13. Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2020

Terlepas dari berbagai permasalahan dalam penyerapan anggran yang dihadapi, secara umum pengelolaan anggaran tahun 2020 seluruhnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap harus dilakukan antara lain melalui :

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan alokasi jadwal kegiatan yang telah disusun;
2. Pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengelola keuangan dengan mempermudah akses informasi keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Sebagai penutup laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran selama tahun 2020. Hasil laporan ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi sekaligus sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang terutama sebagai upaya meningkatkan kinerja.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber dana dan sumberdaya sudah efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata capaian sebesar 111,92% dan penyerapan anggaran sebesar 90,66% serta pemanfaatan sumberdaya optimal dari kelesuluruhan pegawai 70 orang.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan yaitu 8 (delapan) sasaran strategis dengan 12 (duabelas) indikator kinerja, 10 (sepuluh) indikator kinerja melebihi target, 1 (satu) indikator sesuai target dan 1 (satu) indikator tidak tercapai. Rincian capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Capaian indikator yang melebihi target, yaitu : (1) Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD, (2) Persentase tingkat perkembangan BUMDes, (3) Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat, (4) Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan, (5) Angka Kelahiran Total (TFR), (6) Persentase peserta KB aktif, (7) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need), (8) Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun), (9) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, (10) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Capaian indikator yang sesuai target yaitu (1) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun; dan
3. Capaian indikator yang tidak memenuhi target yaitu (1) Persentase tingkat perkembangan desa.

Capaian kinerja yang berhasil memenuhi ataupun melampaui target diantaranya didukung oleh :

1. Keberhasilan dalam mendampingi, membina serta meningkatkan kapasitas kepala desa baru, perangkat desa dan anggota BPD melalui berbagai upaya yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat masal selama pandemi covid-19;
2. Keberhasilan dalam pendampingan, monitoring dan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan manajemen serta pengembangan unit usaha BUMDes, sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan perkembangan BUMDes;
3. Keberhasilan dalam pengerakkan dan pemberdayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat kegotong-royongan dan keswadayaan dalam pembangunan di perdesaan;

4. Meningkatnya pemahaman dan peran kader TP PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendataan secara memadai;
6. Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi Program KB serta penggerakan pelayanan KB;
7. Terlaksana promosi, sosialisasi dan pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja baik melalui jalur formal maupun non formal;
8. Dukungan dan kerjasama dengan mitra kerja dalam penggerakan pelayanan KB.

Permasalahan pada target kinerja yang tidak memenuhi target diantaranya dipengaruhi oleh :

1. Terjadinya bencana alam yang berpengaruh pada menurunnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya strata desa;
2. Meningkatnya kasus stunting yang berpengaruh pada menurunnya strata desa;
3. Kurangnya akses jamban sehat masyarakat sebagai salah satu indikator penilaian strata desa;
4. Pada tahun 2020, pendampingan kepada desa lebih banyak dilaksanakan pada tingkat kecamatan dengan peserta yang terbatas dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 sehingga berpengaruh pada tingkat keberhasilan pendampingan pada tingkat desa;
5. Pandemi covid-19 berpengaruh pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya perkembangan desa.

Berdasarkan uraian di atas, rencana tindak lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diantaranya :

1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan penanganan bencana alam terutama pada daerah-daerah rawan bencana;
2. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan kewenangannya;
3. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan terkait jamban sehat baik dengan instansi pemerintah / swasta maupun dengan masyarakat langsung;
4. Melaksanakan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan intensitas dan kualitas pendampingan kepada desa;
5. Mendorong dan mendampingi desa dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat termasuk pendampingan pembentukan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (BUMDes);
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada nilai komposit IDM terutama pada desa dengan strata tertinggal sebagai dasar kebijakan pembangunan selanjutnya agar strata desa bisa ditingkatkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara ini disusun. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, dapat menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Banjarnegara, 28 Januari 2021

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA,



HENDRO CAHYONO, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681130 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jln. S. Parman No.7 Telp. (0286) 594442 Banjarnegara 53412

e-mail: dispermadesppkb.bna@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH HANDOKO, S.Sos

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDHI SARWONO

Jabatan : Bupati Banjarnegara

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Oktober 2020

PIHAK KEDUA

BUPATI BANJARNEGARA



BUDHI SARWONO

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH HANDOKO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19710131 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Bertambah/ Berkurang
			Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	7%	7%	-
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	80%	80%	-
3	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDesa	60%	60%	-
4	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan	26%	26%	-
		Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di pedesaan	26%	26%	-
5	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	-
6	Meningkatnya kesertaan KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.30%	2.30%	-
		Persentase peserta KB aktif	78.24%	78.24%	-
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	7.01%	7.01%	-
		Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2.97%	2.97%	-
7	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	77	77	-
8	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	B	B	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp919.472.691,00	Rp897.372.691,00	(Rp22.100.000,00)	APBD KAB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp117.000.000,00	Rp362.750.000,00	Rp245.750.000,00	APBD KAB
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp295.000.000,00	Rp214.325.000,00	(Rp80.675.000,00)	APBD KAB
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	APBD KAB
5	Program Keluarga Berencana	Rp7.379.070.000,00	Rp6.858.553.500,00	(Rp520.516.500,00)	APBD KAB dan DAK
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp30.000.000,00	Rp20.000.000,00	(Rp10.000.000,00)	APBD KAB
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp60.000.000,00	Rp43.725.000,00	(Rp16.275.000,00)	APBD KAB
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp30.000.000,00	Rp4.843.250,00	(Rp25.156.750,00)	APBD KAB
9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	APBD KAB
10	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp115.000.000,00	Rp50.214.650,00	(Rp64.785.350,00)	APBD KAB
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp130.000.000,00	Rp95.120.000,00	(Rp34.880.000,00)	APBD KAB
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp142.180.000,00	Rp3.625.978.752,00	Rp3.483.798.752,00	APBD KAB
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	APBD KAB
14	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp200.000.000,00	Rp155.205.000,00	(Rp44.795.000,00)	APBD KAB
15	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	Rp65.000.000,00	Rp68.874.000,00	Rp3.874.000,00	APBD KAB
16	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Rp30.000.000,00	Rp9.518.004,00	(Rp20.481.996,00)	APBD KAB
17	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp45.000.000,00	Rp1.075.700,00	(Rp43.924.300,00)	APBD KAB
18	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp232.500.000,00	Rp199.984.200,00	(Rp32.515.800,00)	APBD KAB
	Jumlah	Rp9.960.222.691,00	Rp12.777.539.747,00	Rp2.817.317.056,00	

Banjarnegara, Oktober 2020

PIHAK KEDUA

BUPATI BANJARNEGARA



BUDHI SARWONO

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA

TEGUH HANDOKO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19710131 199003 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2020

Triwulan : IV

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	7%	3.86%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	80%		214,325,000	208,719,148	Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah anggota BPD yang dilatih	110 orang	110 orang	214,325,000	208,719,148
												Jumlah Kepala Desa baru yang dilatih	195 orang	195 orang		
					Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri	80%	89.84%	3,625,978,752	2,917,416,727	Monitoring & evaluasi keuangan desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi administrasi keuangan desa	266 desa	266 desa	3,575,978,752	2,867,412,020
											Pendamping bantuan keuangan infrastruktur	Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi	56 desa	65 desa	50,000,000	49,504,707
					Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	80%	86.19%	125,000,000	124,980,000	Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	266 desa	266 desa	125,000,000	124,980,000
2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	60%	82.20%	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial	60%	71.80%	30,000,000	29,939,950	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUMDes	47 BUMDes	47 BUMDes	30,000,000	29,939,950

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Program Pengembangan Data/Infomasi	Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	60%	66.67%	20,000,000	19,966,150	Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	3 Karya	3 Karya	20,000,000	19,966,150
3	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	26%	27.81%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	75%	100%	43,725,000	43,560,185	Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat	Jumlah desa yang didampingi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	266 Desa	266 Desa	31,000,000	30,836,435
											Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa	Jumlah desa yang didampingi dan dimonitoring dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat)	140 Desa	140 Desa	12,725,000	12,723,750
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	26%	27.81%	95,120,000	92,553,765	Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD	570 juta rupiah	738 juta rupiah	94,000,000	91,433,765
											Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya	20 UPK	20 UPK	1,120,000	1,120,000
					Peningkatan Perencanaan pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	100%	68,874,000	57,375,300	Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan	Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	68,874,000	57,375,300

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	26%	30.87%	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	26%	30.87%	155,205,000	149,976,350	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah TP PKK (Kecamatan, desa dan kelurahan) yang dibina	56 TP PKK	56 TP PKK	155,205,000	149,976,350
					Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya strata posyandu purnama	30%	25.66%	199,984,200	197,741,200	Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu pratama dan madya yang dievaluasi	412	412	199,984,200	197,741,200
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun	62%	62%	Keluarga Berencana	Prosentase pemetaan pengendalian penduduk dan KB	100%	100%	10,000,000	10,000,000	Penyusunan Paramater Kependudukan	Jumlah Feed Back (Laporan Bulanan)	12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000
					Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	Terlaksananya Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	28.14%	30.41%	9,518,004	9,518,004	Pembinaan Evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah IMP yang Aktif di desa/ Kelurahan	7134 IMP	7134 IMP	9,518,004	9,518,004
												Jumlah IMP Mandiri di desa	2.008 IMP	2.150 IMP		
5	Meningkatnya kesertaan KB	Angka kelahiran total (TFR)	2.30	2.108	Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (TFR)	2.30	2.108			Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin				29,661,000	29,654,551
											DAK Bidang KB	Jumlah pembangunan/ pengembangan / alih fungsi balai penyuluh KB	2 paket pagar kelir Balai Penyuluh KB	2 paket pagar kelir Balai Penyuluh KB	1,162,802,000	967,649,200

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Jumlah pengadaan sarana prasarana Klinik Pelayanan KB	17 unit tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi	17 unit tempat Penyimpanan KIT/alat dan obat kontrasepsi		
												Jumlah pengadaan sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	10 Paket BKL Kit, 10 Paket Genre KIT dan 20 Paket KIE Kit	10 Paket BKL Kit, 10 Paket Genre KIT dan 20 Paket KIE Kit		
												Jumlah pengadaan media/alat pengolahan data	21 Unit LCD Proyektor	21 Unit LCD Proyektor		
												Jumlah pengadaan sarana petugas lapangan KB	5 paket sarana kerja PKB/PLKB	5 paket sarana kerja PKB/PLKB		
												Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	1 Unit papan nama rumah data kependudukan, 1 unit pengadaan personal komputer dan printer, 1 unit rak buku, 1 unit display data, 1000 unit leaflet rumah dataku	1 Unit papan nama rumah data kependudukan, 1 unit pengadaan personal komputer dan printer, 1 unit rak buku, 1 unit display data, 1000 unit leaflet rumah dataku		
											Operasional Keluarga Berencana	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapat bantuan operasional KB	20 Balai	20 Balai	5,644,948,000	5,486,100,266

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Jumlah KKB yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi	42 KKB	42 KKB		
												Jumlah Kampung KB yang melaksanakan integrasi program KKBPK dan pembangunan lainnya	56 kampung	56 kampung		
												Jumlah Kampung KB yang melaksanakan integrasi program KKBPK dan pembangunan lainnya	56 kampung	56 kampung		
												Jumlah kampung KB yang mendapat bantuan operasional KB	56 kampung	56 kampung		
												Jumlah Penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik	2 paket	2 paket		
												Dukungan Manajemen	12 Bulan	12 Bulan		

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase peserta KB aktif	78.24%	80.24%	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif	78.24%	80.24%	50,214,650	35,795,053	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah peserta KB MOW yang difasilitasi	27 orang	25 orang	50,214,650	35,795,053
												Jumlah peserta KB MOP yang difasilitasi	2 orang	2 orang		
		Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	7.01%	6.91%	Keluarga Berencana	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	7.01%	6.91%	11,142,500	11,142,500	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah PUS tidak ber KB	49801 orang	49801 orang	11,142,500	11,142,500
		Menurunnya PUS usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun)	2.97%	1.72%	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase PUS yang menikah usia 15 sampai 19 tahun	2.97%	1.72%	4,843,250	4,843,250	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun	6797 PUS Usia 15 s.d 19 thn	6797 PUS Usia 15 s.d 19 thn	4,843,250	4,843,250
					Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase PIK Remaja Tegar	23%	10%	1,075,700	1,075,700	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	Jumlah anggota Saka Kencana	40 orang	40 orang	1,075,700	1,075,700
6	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77	90.38	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran.	100%	100%	897,372,691	828,667,468	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pembayaran telepon, speedy, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	107,200,000	73,192,723
											Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	56,200,000	56,200,000
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan dan pembersihan kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	17,000,000	16,050,000

No	Indikator RPJM	Indikator Sasaran	Kinerja		Program	Indikator Program	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	156,500,000	146,784,281
											Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	560,472,691	536,440,464
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	362,750,000	342,778,375	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	76,750,000	63,773,500
											Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	3 unit	206,000,000	200,855,500
											Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	78,149,375
7	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	BB	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,000,000	15,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	8 Dokumen	8 Dokumen	15,000,000	15,000,000


 BanjarNEGARA, 28 Januari 2021
 Kepala Dispermades PPKB
 Kab. BanjarNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE., MSI.
 NIP. 19681130 199703 1 007